



PROFIL GENDER



**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Padang Pariaman**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “Profil Gender Tahun 2025”. Serta Shalawat dan Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi Gender di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan buku ini kami memperoleh dukungan/bantuan dari pihak terkait. Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisi-Nya.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna. Oleh karena itu mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya kedepan.

Pariaman, 1 Juli 2025
Kepala DinsosP3A



Dra. SUMARNI, M.Pd
NIP.19681023 199303 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	ix

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Sumber Data.....	3
D. Sistematika Penyajian.....	3

BAB II Gambaran Umum Kondisi Wilayah

A. Geografis dan Astronomis.....	7
B. Sejarah.....	8
C. Sosial dan Budaya.....	10
D. Biografi Menteri Pemberdayaan Perempuan.....	11
E. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	12

BAB III Gender Bidang Kependudukan

A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	13
B. Penduduk Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	14
C. Jumlah Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	14
D. Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
E. Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024.....	19
F. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	21

BAB IV Gender Bidang Kesehatan

A. Akses Terhadap Air Minum.....	23
B. ASI Eksklusif.....	23
C. HIV/ AIDS	25
D. Angka Kematian Bayi.....	26
E. Angka Kematian Ibu.....	28
F. Status Gizi.....	29
G. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).....	32
H. Keluarga Berencana.....	34

BAB V Gender Bidang Pendidikan

A. Angka Partispasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA.....	38
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (7-12, 13-15 dan 16 – 18 Tahun 2024.....	39
C. Angka Partispasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA.....	41
D. Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan SD, SMP, dan SMA Tahun 2024.....	42
E. Sertifikasi Guru.....	44

BAB VI Gender Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

A. Tenaga Kerja Migran.....	48
B. Pekerja di Sektor Formal.....	49
C. Pekerja Sektor Informal.....	49
D. Usaha Mikro.....	50
E. Serikat Pekerja.....	50

BAB VII Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

A. Partisipasi dilembaga Legislatif.....	51
a. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Partai dan Jenis Kelamin.....	51
b. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Komisi dan Jenis Kelamin.....	52
B. Partisipasi dilembaga Yudikatif.....	53
a. Jumlah Jaksa Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	

Tahun 2024.....	53
b. Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	53
C. Partisipasi dilembaga Eksekutif	
a. Jumlah Camat di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	54
b. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.....	55
c. Jumlah Wali Nagari Tahun 2024.....	55
BAB VIII Gender Bidang Hukum, Sosial dan Budaya	
A. Bidang Hukum	61
B. Bidang Sosial.....	61
C. Bidang Budaya.....	62
BAB IX Penutup	
1. Kesimpulan	66
2. Saran.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Anak Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.5 Pendidikan Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.6 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.1 Akses Terhadap Air Minum
Padang Pariaman

Tabel 4.2 Jumlah Pemberian ASI Eksklusif
Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.3 Data HIV/ AIDS di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.4 Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.5 Angka Kematian IBU
di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.6 Status Gizi di Kabupaten Padang Pariaman Tahun

Tabel 4.7 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Umur di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.8 Cakupan Akseptor Keluarga Berencana
Jenis kelamin di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang
Pendidikan SD,SMP & SMA di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang
Pendidikan SD,SMP & SMA di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut
Kelompok Kecamatan, Jenjang Pendidikan
SD,SMP & SMA

Tabel 5.4 Angka Putus Sekolah menurut Kelompok
Kecamatan, Jenjang Pendidikan SD , SMP
berdasarlam Jenis Kelamin

Tabel 5.5 Angka Sertifikasi Guru, Jenjang Pendidikan SD
dan Jenis Kelamin

Tabel 5.6 Angka Sertifikasi Guru, Jenjang Pendidikan SMP
dan Jenis Kelamin

Tabel 5.12 Angka Putus Sekolah menurut Kelompok Kecamatan, Jenjang Pendidikan SMA dan Jenis Kelamin Tahun 2024	43
Tabel 5.13 Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi jenjang Pendidikan SD dan Jenis Kelamin Tahun 2024	45
Tabel 5.14 Jumlah Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi jenjang Pendidikan SMP dan Jenis Kelamin Tahun 2024	45
Tabel 5.15 Jumlah Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi jenjang Pendidikan SMA dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	46
Tabel 6.1 Jumlah Tenaga Migran Antar Negara (AKAN) di Kabupaten PadangPariaman Tahun 2024	48
Tabel 6.2 Jumlah Pekerja Sektor Formal menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Padang PariamanTahun 2024	49
Tabel 6.3 Jumlah Keanggotaan Koperasi menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariamann Tahun 2024.....	50
Tabel 7.1 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2024	52
Tabel 7.2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2024	52
Tabel 7.3 Jumlah Jaksa menurut Provinsi dan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	53
Tabel 7.4 Jumlah Polisi menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	54
Tabel 7.5 Jumlah Camat menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	54

Tabel 7.6	Jumlah Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	55
Tabel 7.7	Jumlah Wali Nagari menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.....	56
Tabel 8.1	Jumlah Anak yang ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Asuhan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	61
Tabel 8.2	Jumlah Rekapitulasi Korban Respon Kasus terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	63
Tabel 8.3	Jumlah Rekapitulasi Kasus Pelaku terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	63
Tabel 9.1	Perubahan Iklim Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024	64
Tabel 9.2	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan Padang Pariaman Tahun 2024.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.....	8
-------------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan gender adalah proses pembangunan yang memperhatikan perbedaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan pada dasarnya tidak hanya sekadar menciptakan kesempatan bagi orang-orang untuk memperoleh mata pencaharian yang berkelanjutan, pembangunan yang berhasil perlu memperhatikan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi semua orang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan meyakini bahwa kesetaraan gender merupakan komponen fundamental untuk mewujudkannya. Ketidaksetaraan gender merupakan rangkaian panjang statistik yang menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kenyataannya, ketidaksetaraan gender adalah tantangan besar di tingkat lokal, nasional, dan global karena tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu laki-laki dan perempuan, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghalangi pembangunan.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender telah berlangsung lebih dari dua dekade. Salah satu tonggak penting adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Sebelum itu, pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Melalui

ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kedua instrumen hukum ini menjadi dasar utama dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan budaya Indonesia.

Urgensi PUG dalam pembangunan di Indonesia sejalan dengan komitmen internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disepakati oleh 189 negara pada tahun 2000, termasuk Indonesia. Kesetaraan gender merupakan tujuan kelima dalam SDGs dan menjadi perspektif bagi 16 tujuan lainnya. SDGs menekankan bahwa kesetaraan gender harus diintegrasikan ke dalam semua aspek pembangunan. Dalam konteks pembangunan, terdapat tiga perspektif yang digunakan untuk memahami kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Effendi dalam Santoso, 2004).

Kelompok rentan ini termasuk perempuan, anak-anak, penduduk miskin, disabilitas, nelayan dan petani kecil, penduduk usia tua, penduduk wilayah kumuh, dan penduduk wilayah terpencil. Perempuan dan anak-anak jumlahnya paling besar karena mereka terdapat dalam kelompok-kelompok penduduk rentan lainnya. Dengan demikian, perhatian besar perlu diarahkan kepada kelompok ini. Informasi yang disediakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan pemerintah harus dalam bentuk data terpilah karena ketersediaan data terpilah ini memungkinkan pemerintah daerah menentukan target dukungannya sehingga lebih tepat sasaran.

Data terpilah gender memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi perbedaan keadaan antara laki-laki dan perempuan, mengevaluasi dampak intervensi pembangunan, serta mengidentifikasi masalah yang dialami kedua kelompok. Data tersebut harus dikombinasikan dengan variabel lain seperti umur, pendidikan, status sosial-ekonomi, dan latar belakang budaya. Data terpilah ini juga menjadi inti dalam menghasilkan statistik gender yang penting untuk perencanaan pembangunan kedepannya.

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Untuk meningkatkan partisipasi ini, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat agar manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Oleh karena itu, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Suatu program atau kegiatan pembangunan akan memberikan hasil yang ideal bila dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, meskipun keterbatasan sumber daya sering menjadi kendala. Dalam situasi sumber dana yang terbatas, segmentasi untuk mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan, yaitu kelompok rentan atau rawan, perlu dilakukan.

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis, dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Penyediaan dan pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia menjadi

suatu keniscayaan, khususnya terkait dengan INPRES No.9/2000 tentang PUG di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam pengembangan data dan informasi, baik tingkat nasional maupun daerah. Ini juga sejalan dengan hasil kesepakatan Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing, yang mendesak layanan statistik di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk mengumpulkan data terpisah menurut jenis kelamin dan usia, serta menghasilkan statistik gender yang diperlukan.

Dalam pembahasan soal gender, perlu diperhatikan kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam, serta pengambilan keputusan dalam keluarga, di komunitas, dan di tingkat nasional. Laki-laki dan perempuan kerap kali memiliki perbedaan dalam prioritas, hambatan, dan pilihan terkait dengan pembangunan, serta dapat mempengaruhi dan dipengaruhi secara berbeda oleh program-program pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitas, pertimbangan tersebut perlu disikapi dalam semua perencanaan dan pelaksanaan program. Memahami isu gender memungkinkan program-program lebih memperhatikan persoalan gender dan membangun kapasitas untuk menghadapi dampak-dampak ketidaksetaraan serta memastikan keberlanjutan. Menindaklanjuti persoalan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan bagi pemerintah daerah dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpisah sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dengan kriteria Nindya. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 memiliki nilai sebesar 93,92 yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 yakni 93,32. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 adalah sebesar 48,05 mengalami peningkatan dari tahun 2023 yakni 47,79. Kondisi ini terjadi karena rendahnya partisipasi perempuan di berbagai bidang penting seperti politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, serta dipengaruhi oleh norma sosial tradisional, keterbatasan ekonomi, kurangnya kebijakan pendukung, dan akses pendidikan yang tidak merata.

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Padang Pariaman masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di provinsi Sumatera Barat, untuk itu perlu ditingkatkan dengan dukungan dari berbagai program maupun kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah buku “Profil Gender Kabupaten Padang Pariaman 2025” sebagai kebutuhan yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender dan pemenuhan hak anak.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mendukung kegiatan penyusunan

profil gender Kabupaten Padang Pariaman adalah:

1. UUD 1945 pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. UUD 1945 Pasal 28 c ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
3. UUD 1945 Pasal 28 b ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
5. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
13. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 331 /KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Buku Profil Gender dan Anak tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk menyajikan data

terpilah yang dapat memberikan informasi secara jelas mengenai keadaan serta kondisi perempuan maupun laki-laki yang terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan, sektor publik kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak yang berada di kabupaten Padang Pariaman yang dilihat dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak mengenai permasalahan sosial, dan lainnya.

D. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam buku ini berasal dari berbagai macam instansi di antaranya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, Komando Distrik Militer 0308 Pariaman, Polisi Resort Pariaman, Polisi Resort Kabupaten Padang Pariaman, Kejaksaan Negeri Pariaman, Pengadilan Negeri Pariaman, Pengadilan Agama Pariaman, Lembaga Permasyarakatan Pariaman dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

E. Sistematika Penyajian

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Wilayah
BAB III	:	Gender di Bidang Kependudukan
BAB IV	:	Gender di Bidang Kesehatan
BAB V	:	Gender di Bidang Pendidikan
BAB VI	:	Gender di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
BAB VII	:	Gender di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
BAB VIII	:	Gender di Bidang Hukum, Sosial dan Budaya
BAB IX	:	Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

A. Geografis dan Astronomis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu kabupaten yang termasuk dalam Sembilan belas wilayah yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km², dengan panjang garis pantai 42,11 Km, yang dimana memiliki batasan diantaranya.

Utara : Kabupaten Agam

Selatan : Kota Padang

Barat : Samudera Indonesia

Timur : Kabupaten Solok & Kabupaten Tanah Datar

Secara Astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak pada 0011'-0049' Lintang Selatan (LS) dan antara 98036'-100028' Bujur Timur (BT). Kabupaten Padang Pariaman terbagi atas tujuh belas Kecamatan diantaranya:

Tabel 2.1

Nama Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman

Daftar kecamatan dan nagari di Kabupaten Padang Pariaman, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
13.05.17	Enam Lingkung	5	Nagari	• Gadur • Koto Tinggi • Pakandangan • Parit Malintang

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
				Toboh Ketek
13.05.16	Patamuan	6	Nagari	- Kampung Tanjuang Koto Mambang Sungai - Sungai Durian - Tandikek - Tandikek Barat - Tandikek Selatan - Tandikek Utara
13.05.15	2x11 Kayu Tanam	4	Nagari	- Anduriang - Guguak - Kapalo Hilalang - Kayu Tanam
13.05.14	V Koto Timur	4	Nagari	- Gunung Padang Alai - Kudu Gantiang - Kudu Gantiang Barat - Limau Puruik
13.05.13	Batang Gasan	3	Nagari	- Gasam Gadang - Malai V Suku - Malai V Suku Timur
13.05.12	Padang Sago	6	Nagari	- Batu Kalang - Batu Kalang Utara - Koto Baru - Koto Dalam - Koto Dalam Barat

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
				Koto Dalam Selatan
13.05.11	Sintuk Toboh Gadang	5	Nagari	- Sintuk - Toboh Gadang - Toboh Gadang Barat - Toboh Gadang Selatan - Toboh Gadang Timur
13.05.10	Ulakan Tapakis	8	Nagari	- Kampung Gelapuang Ulakan - Manggopoh Palak Gadang Ulakan - Padang Toboh Ulakan - Sandi Ulakan - Seulayat Ulakan - Sungai Gimba Ulakan - Tapakih - Ulakan
13.05.09	IV Koto Aur Malintang	5	Nagari	- III Koto Aur Malintang - III Koto Aur Malintang Selatan - III Koto Aur Malintang Timur - III Koto Aur Malintang Utara - Balai Baik

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
				Malai III Koto
13.05.08	Sungai Limau	4	Nagari	• Guguak Kuranji Hilir • Koto Tinggi Kuranji Hilir • Kuranji Hilir • Pilubang
13.05.07	Sungai Geringging	4	Nagari	• Batu Gadang Kuranji Hulu • Kuranji Hulu • Malai III Koto • Sungai Sirah Kuranji Hulu
13.05.06	V Koto Kampung Dalam	8	Nagari	• Campago • Campago Barat • Campago Selatan • Sikucur • Sikucur Barat • Sikucur Tengah • Sikucur Timur • Sikucur Utara
13.05.05	VII Koto Sungai Sarik	12	Nagari	• Ambuang Kapua Sungai Sariak • Balah Aie • Balah Aie Timur • Balah Aie Utara • Bisati Sungai Sariak • Lareh Nan Panjang • Lareh Nan Panjang Barat

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
				• Lareh Nan Panjang Selatan • Lareh Nan Panjang Sungai Sariak • Limpato Sungai Sariak • Lurah Ampalu • Sungai Sariak
13.05.04	2x11 Enam Lingkung	3	Nagari	• Lubuk Pandan • Sicincin • Sungai Asam
13.05.03	Nan Sabaris	9	Nagari	• Kapalo Koto • Kurai Taji • Kurai Taji Timur • Padang Bintungan • Padang Kandang Pulau Air Padang • Pauh Kamar • Sunua • Sunua Barat • Sunua Tengah
13.05.02	Batang Anai	8	Nagari	• Buayan Lubuk Alung • Kasang • Katapiang • Sungai Buluah • Sungai Buluah Barat • Sungai Buluah Selatan • Sungai Buluah

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah	Status	Daftar
				Timur Sungai Buluah Utara
13.05.01	Lubuk Alung	9	Nagari	- Aie Tajun Lubuk Alung - Lubuk Alung - Nagari Balah Hilia Lubuk Alung - Pasie Laweh Lubuk Alung - Pungguang Kasiak Lubuk Alung - Salibutan Lubuk Alung - Sikabu Lubuk Alung - Singguliang Lubuk Alung - Sungai Abang Lubuk Alung
	TOTAL	103		

Sumber : Dinas DPMD Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)
1	Batang Anai	180.39
2	Lubuk Alung	111.63
3	Sintuk Toboh Gadang	25.56
4	Ulakan Tapakis	38.85
5	Nan Sabaris	29.12
6	2x11 Enam Lingkung	36.25
7	Enam Lingkung	39.2
8	2x11 Kayu Tanam	228.7
9	VII Koto Sungai Sarik	90.93
10	Patamuan	53.05
11	Padang Sago	32.06
12	V Koto Kampung Dalam	61.41
13	V Koto Timur	64.8
14	Sungai Limau	70.38
15	Batang Gasan	40.31
16	Sungai Geringging	99.35
17	IV Koto Aur Melintang	126.8
	Kab. Padang-Pariaman	1.328.79

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel diatas, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 Km², sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Sintuk Toboh Gadang dengan luas wilayah 25,56 Km².

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

B. Sejarah

Padang Pariaman sebelumnya berasal dari Pagaruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk. I Sumbar, 1978:7). Menurut Tokoh Sumbar Buya Hamka mengatakan nama Pariaman sendiri berasal dari kata bahasa arab, “Barri aman” yang artinya: tanah daratan aman dan sentosa (Suryadi, 2004 : 92). Dalam istilah lainnya kata Pariaman berasal dari “parik nan aman” yang artinya pelabuhan yang aman. Kapal - kapal yang singgah untuk berdagang di Bandar-bandar di rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006 :1)

Sebelumnya orang Eropa datang ke kawasan rantau Pariaman, kota- kota pelabuhan penting dikawasan ini seperti pelabuhan Pariaman dan Tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari Arab, China, dan Gujarad (Suryadi, 2004:93). Setelah kemerdekaan, daerah administrasi periode kolonial Pariaman, *Tikoe en de danau distristen*, kemudian disahkan menjadi Kabupaten PadangPariaman berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 dengan Ibu Kota Pariaman. Pada awalnya, kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan peraturan komisariss pemerintah di

Sumatera No. 81/ Kom / U / 1948 Tentang pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang berasal dari sebelas kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar Kota, Mentawai dan Nagari-nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari tujuh belas wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana propinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi empat belas Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 No. 10 / G.M / S.T.G / 49, dikurangi dengan daerah kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Panggilun, Marapalam, Teluk Bayur, Seberang Padang, dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai yang dimaksud dalam Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 dengan Nomor 65 / G.P / 50, Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad.

Kabupaten Padang Pariaman sampai sekarang memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari yang telah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120 / 453 / PEM – 2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari sampai sekarang.

C. Sosial dan Budaya

Seperti halnya Minangkabau, memiliki beragam macam suku dan budaya diantaranya menganut sistem matrilineal (garis keturunan yang berasal dari kaum perempuan/Ibu). Pada awalnya pembentukan budaya Minangkabau yang terbagi atas dua orang Datuk, yaitu Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan, dimana sebelumnya terbagi atas empat suku indukdari dua kelarasan diantaranya, Suku Bodi, Suku Chaniago, Suku Koto, Suku Piliang.

Semakin berkembangnya zaman, suku yang ada di Minangkabau telah terbagi beragam macam suku yaitu, Suku Guci, Suku Jambak, Suku Sikumbang, Suku Tanjung dan beragam macam suku lainnya yang ada di Minangkabau. Pada umumnya orang Minang merupakan pemeluk agama Islam terbanyak di Provinsi Sumatera Barat yang khususnya Kabupaten Padang Pariaman yang dimana “Adat Basandi Syarak’, Syara’ Basandi Kitabullah” (Adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al- Qur’an) yang merupakan cerminan adat orang Minang yang berlandaskan Agama Islam.

Dari hal tersebut, Minangkabau tidak terlepas dari masing-masing peran dalam Adat diantaranya, Niniak Mamak (Penghulu), Alim Ulama (Suluah Bendang dalam Nagari) dan Cadiak Pandai (Cendikiawan). Ketiga pemimpin tersebut memiliki bagian yang dipimpinnya masing-masing. Niniak Mamak (Penghulu) memimpin anak dan kemenakan atau yang dikenal dengan istilah Anak dipangku Kamanakan dibimbiang, Alim Ulama mengajarkan Ilmu Agama yang diajarkan terhadap kaum nagari, sedangkan Cadiak Pandai yaitu memberikan Ilmu yang bermanfaat di lingkungan sekitar. Ketiga pemimpin tersebut dikenal dengan istilah “Tungku Tigo Sajarangan”.

Sampai sekarang adat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan secara bersama baik secara musyawarah maupun mufakat atau yang dikenal dengan istilah Bajanjang Naik Batanggo Turun artinya segala sesuatu harus mengikuti jalur yang telah ditetapkan agar tertib dan terlaksananya dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sinegritas antara adat dan berbagai elemen lainnya di Sumatera Barat, Terutaman di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Biografi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Kabinet Prabowo-Gibran adalah Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si, beliau lahir di Madura pada 28 Juli 1969.

Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si adalah sosok perempuan yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di kalangan perempuan, berkiprah dalam advokasi isu-isu perempuan dan anak di Indonesia.

Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta, termasuk di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah As Syafiiyah Jatiwaringin. Ia melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Dakwah IAIN Yogyakarta, lulus pada 1994 dan meraih gelar Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia berkat beasiswa Ford Foundation pada tahun 2002.

Di dunia organisasi, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si terlibat aktif sejak masa mudanya. Pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) DIY pada 1989 hingga 1991 dan menduduki berbagai posisi penting di organisasi lainnya, termasuk Sekjen Pimpinan Pusat Fatayat NU dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muslimat NU. Ia juga aktif di Majelis Alimat Indonesia dan Majelis Ulama

Indonesia (MUI), serta terlibat dalam berbagai gerakan sosial, seperti Gerakan Nasional Anti Korupsi bersama NU dan Muhammadiyah. Selain aktif di organisasi dan memiliki karier yang gemilang di berbagai bidang. Sebagai seorang produser, beliau telah memproduksi acara-acara televisi populer seperti "Syair Dzikir" di TPI dan "Hikmah Pagi" di TVRI.

Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si juga pernah menjadi Show Manager untuk konser kebangsaan kolaborasi antara Ki Ageng Ganjur dengan musisi internasional, seperti Tony Blackman dari Amerika Serikat dan Mary McBride. Pernah memimpin berbagai tim seni budaya Indonesia dalam tur internasional ke berbagai negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Belanda. Di bidang sosial, beliau adalah Direktur PT Arzast Media Utama dan PT Rimang Hayu Malini, serta turut aktif dalam berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama Muslimat NU dengan Kementerian Desa RI untuk program pemberdayaan masyarakat desa.

Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si juga telah menghasilkan karya ilmiah, termasuk bukunya yang berjudul "Kabar Kekerasan Dari Bali". Ia juga menjadi penerima Beasiswa dari Ford Foundation untuk studi program Pasca Sarjana Komunikasi Universitas Indonesia, dan memiliki sertifikat kompetensinya dalam bidang MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Gambar 2.2

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si

E. Profil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas pokok yaitu: ***“Membantu Bupati melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pengarusutamaan gender, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak”***

BAB III

GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN

Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor alami, yakni kematian dan kelahiran, dan faktor non alami yaitu migrasi. Dinamika penduduk menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap negara pada hakikatnya berdiri untuk satu tujuan yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang sejahtera tercermin dalam kehidupan sosial dan ekonominya yang berkualitas. Perubahan komposisi penduduk atau dinamika penduduk sangat berperan bagi keberhasilan pembangunan (Yasinto Shindu P, 2017).

A. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan disetiap Tahun. Pada tahun 2024 jumlah penduduk di kabupaten Padang Pariaman, mengalami penurunan karena adanya penduduk yang pindah ke kota lain maupun meninggal dunia. Dimana kita dapat melihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2020	214.735	216.489	431.224
2	2021	214.735	216.489	431.224
3	2022	218.133	218.760	436.893
4	2023	228.417	226.801	455.218
5	2024	209.997	216.849	426.846

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 3.1

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2020-2024



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan pada tabel 3.1 diatas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk perempuan lebih banyak 6.852 jiwa dari jumlah penduduk laki-laki dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah total 426.846 jiwa.

B. Penduduk Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk menurut umur 0-18 tahun di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 136.092 jiwa terdiri dari 70.848 laki-laki dan 65.244 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk lanak aki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk anak perempuan.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Anak Menurut Jenis Kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2024	70.848	65.244	136.092

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Garfik 3.2
Jumlah Penduduk Anak Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2024



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan pada tabel 3.2 dan grafik 3.2 diatas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk anak laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk anak perempuan yaitu 5.604 dari jumlah penduduk anak yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah 136.092 jiwa.

C. Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2024 sebanyak 65.726 jiwa.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Penduduk Lansia (Umur 60+)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tahun 2023	32.383	33.343	65.726

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Grafik. 3.3
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan pada tabel 3.3 diatas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk lansia perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk lansia laki-laki dengan selisih angka yaitu 960 jiwa dari jumlah penduduk lansia yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah total 65.726 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup masyarakat lansia perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Penduduk Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Data penduduk Disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman mencatat terdapat 3.341 pemilih disabilitas yang sudah memiliki hak pilih (Umur 17+).

Jumlah Penduduk Disabilitas (Umur 17+) Tahun 2024

No	Penduduk Disabilitas (Umur 17+)	Jenis Disabilitas		Jumlah
		Fisik	Intelektual	
1	Tahun 2024	2.433	908	3.341

Sumber: KPU Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan data Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman mencatat

terdapat 3.341 pemilih disabilitas yang terdiri dari 2.433 jiwa disabilitas fisik dan 908 jiwa disabilitas intelektual.

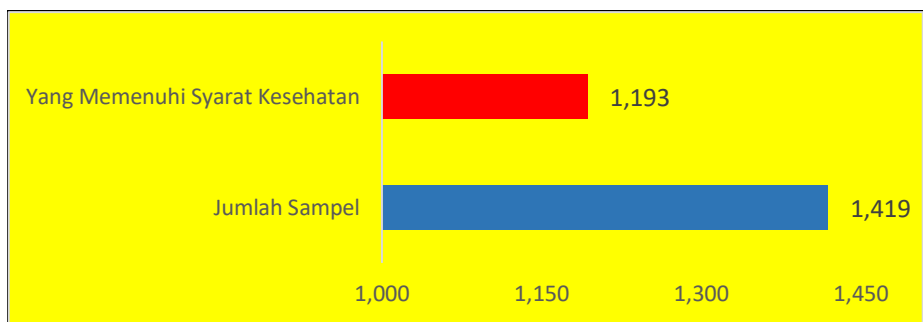
BAB IV

GENDER BIDANG KESEHATAN

A. Akses Terhadap Air Minum

Jumlah sarana air minum di kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah 82.397. Jumlah sarana air minum yang diambil sampel adalah 1.419 sarana, yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 1.193 sarana dapat dilihat dari grafik di bawah ini

Grafik. 4.1
Data Sarana Air Minum



Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

B. Pemberian ASI Eksklusif

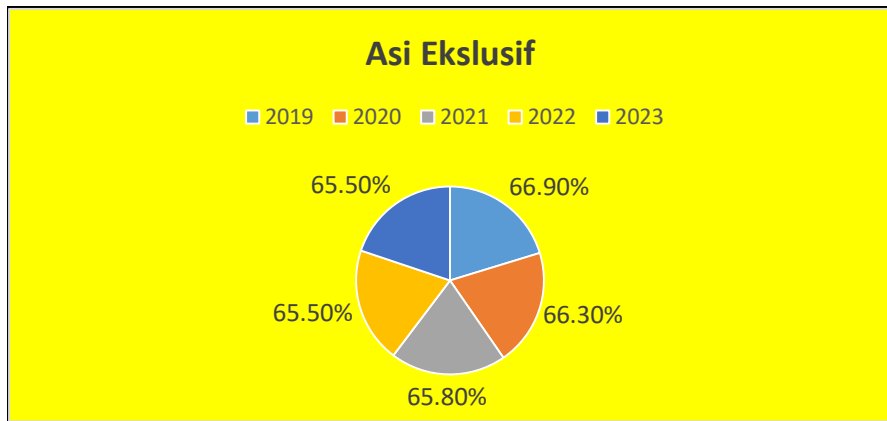
Asi Eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa diberikannya makanan dan minuman lain kepada bayi dari lahir sampai beranjak usia 6 bulan, kecuali pemberian vitamin dan obat-obatan. Air Susu Ibu (ASI) merupakan (Kolostrum) makanan yang terbaik dan sempurna bagi bayi, karena mengandung semua gizi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bayi mengandung protein serta vitamin A yang dapat meningkatkan imunitas bayi sehingga terhindar dari penyakit. Pemberian ASI Eksklusif Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4.2
Persentase Pemberian ASI Eksklusif

No.	Tahun	Persentase
1	2019	66,9%
2	2020	66,3%
3	2021	65,8%
4	2022	65,5%
5	2023	65,5%

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 4.2
Persentase Pemberian ASI Eksklusif



Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Dari Grafik di atas dapat diketahui jumlah pemberian ASI Eksklusif Tahun 2019-2023 mengalami persentase penurunan setiap tahunnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012, ASI Eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah dan/atau mengganti makanan atau minuman lain. Namun ada beberapa kegagalan pemberian ASI karena faktor internal kondisi bayi dan kondisi ibu. Kondisi bayi meliputi BBLR, trauma persalinan, infeksi, kelainan kongenital, bayi kembar dll. Sedangkan kondisi ibu yang menjadi penyebab gagalnya ASI Eksklusif adalah

pembengkakan, abses payudara, ibu kurang gizi, mengidap penyakit menular (Brown).

C. HIV/AIDS

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2023, kasus HIV/AIDS di Indonesia mencapai 500 ribu lebih hingga September 2023. Dari total kasus tersebut, 88% atau 454.723 kasus sudah terkonfirmasi oleh penderitanya atau orang dengan HIV (ODHIV). Mayoritas pengidap HIV di Indonesia berusia 25-49 tahun, yakni sebanyak 69,9% dari total kasus.

Sementara itu jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Di Tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumatera Barat tercatat hingga akhir tahun 2023 jumlah penderita HIV-AIDS sudah mencapai 2.704 Orang.

Pada tahun 2023, jumlah kasus HIV di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 23 yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kasus HIV di Kabupaten Padang Pariaman berada di peringkat 6 tertinggi di Sumatera Barat. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan peningkatan kasus HIV di Kabupaten Padang Pariaman, antara lain: Maraknya hubungan seksual sesama jenis (LGBT), Perilaku seksual menyimpang, Penularan melalui jarum suntik narkoba, Penularan melalui pisau cukur di pangkas.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dapat menyerang sistem imunitas seseorang, dimana penderita mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terinfeksi dari vektor penyakit. Penurunan HIV sendiri dapat terjadi melalui cairan tubuh ODHA (orang dengan HIV/AIDS) yang terjadi melalui penggunaan jarum suntik, transfusi darah, pergaulan bebas, serta dari Ibu ke bayi dalam proses kehamilan, persalinan dan menyusui. Data penyebaran

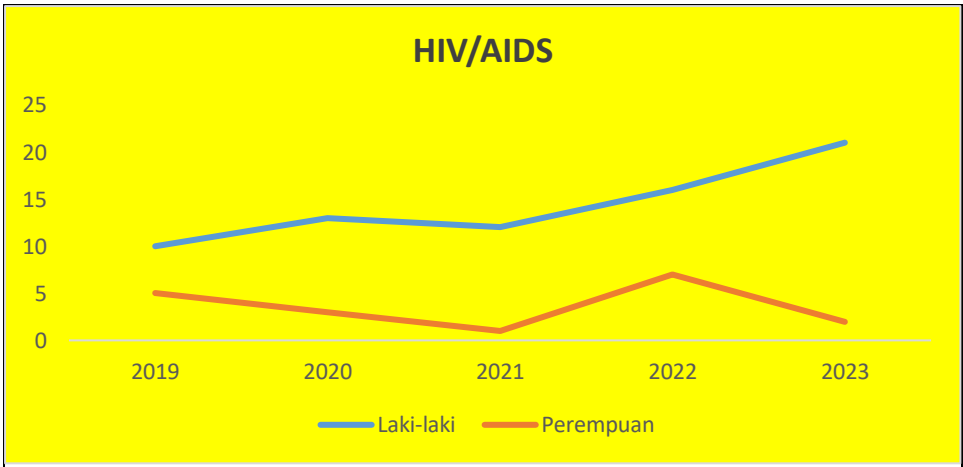
HIV/AIDS Kabupaten Padang Pariaman sendiri dapat kita lihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4.3
Data HIV-AIDS Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2020	13	3	16
2021	12	1	13
2022	16	7	23
2023	21	2	23
2024	68	4	72

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 4.3
Data HIV-AIDS Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2019 - 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Dari grafik di atas dapat diketahui jumlah penderita HIV-AIDS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama dengan jenis kelamin laki-laki yang pada tahun 2024 berjumlah 68 orang yang mana tahun sebelumnya berjumlah 21 orang.

D. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian pada bayi pada usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. Dari sisi penyebabnya, kematian bayi dikarenakan ada dua macam, yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau kematian neonatal disebabkan faktor-faktor yang bawa sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi. Sedangkan kematian bayi eksogen atau kematian Post-neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi di Kabupaten Padang Pariaman menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini.

Tabel 4.4
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jenis Kelamin		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2022	Neonatal	0	0	0
		Bayi	0	0	0
		Balita	0	0	0
2	2023	Neonatal	0	0	0
		Bayi	0	0	0
		Balita	0	0	0
3	2024	Neonatal	0	0	0
		Bayi	0	0	0
		Balita	0	0	0

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel di atas diketahui tidak ditemukan kasus kematian neonatus, bayi dan balita di kabupaten Padang Pariaman tahun 2022-2024.

E. Angka Kematian Ibu Hamil

Kematian maternal atau kematian ibu menurut batasan dari *The Tenth Revision of International Classification of Diseases (ICD-10)* adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau 42 hari setelah melahirkan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya. Akan tetapi angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO 2015).

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Dimana angka Kematian terhadap Ibu disebabkan karena terganggunya proses kehamilan atau penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau aksus insidentil) selama kehamilan. Angka kematian terhadap Ibu menurut Dinas Kesehatan Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4.5
Angka Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Kematian Ibu Hamil
2020	9
2021	4
2022	6
2023	0
2024	0

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 4.5
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024



Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Dari grafik dan tabel yang ada, terlihat bahwa trend kenaikan kematian Ibu hanya terjadi di tiga tahun awal dari data lima tahun yang ada. Setelah itu trend kematian pada Ibu di dua tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Sementara itu jika dilihat dari data dinkes pada kematian Ibu pada tahun 2023 dan 2024 tidak terjadi pada kasus kematian Ibu hamil

Tabel 4.6
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet
Tambah Darah (TTD) Berdasarkan Kecamatan dan
Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2024

No	Kecamatan	Puskesmas			
			Jumlah Ibu Hamil	TTD (90%) Jumlah	%
1	Batang Anai	Kataping	233	233	100
		Pasar Usang	706	649	91,67
2	Lubuk Alung	Lubuk Alung	693	693	100
		Sikabu	154	122	79,20
3	Sintuk Toboh Gadang	Sintuk	298	296	100
4	Ulakan Tapakis	Ulakan	320	281	87,81

5	Nan Sabaris	Pauh Kambar	477	421	88,26
6	2x11 Enam Lingkung	Sicincin	285	263	92,28
		Kampung Guci	151	183	94,70
7	Enam Lingkung	Pakandanga n	328	312	95,12
8	2x11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	182	142	78,02
		Anduring	141	141	100
9	VII Koto	Sungai Sarik	455	395	86,81
		Ampalu	169	169	100
10	Patamuan	Patamuan	259	259	100
11	Padang Sago	Padang Sago	160	153	95,63
12	V Koto Kampung Dalam	Kampung Dalam	217	204	94,01
		Sikucur	160	153	95,63
13	V Koto Timur	Padang Alai	79	65	82,28
		Limau Purut	152	123	80,92
14	Sungai Limau	Sungai Limau	485	430	88,66
15	Batang Gasan	Gasan Gadang	137	109	79,56
16	Sungai Geringging	Sungai Geringging	252	203	80,56
		Koto Bangko	259	255	98,46
17	IV Koto Aur Malintang	Batu Basa	306	255	83,33
Jumlah			7.079	6.471	91,66

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 4.6, sebanyak 91,66 % ibu hamil sudah mendapatkan Tablet tambah darah (TTD) selama hamil, pencapaian ini sudah melebihi dari target dari Kementerian Kesehatan RI yaitu

90%.

Tabel 4.7
Cakupan Pertolongan Persalinan Berdasarkan
Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Penolong Persalinan		
			Dokter	Bidan	Dukun
1	Batang Anai	Kataping	82	129	0
		Pasar Usang	172	400	0
2	Lubuk Alung	Lubuk Alung	16	489	0
		Sikabu	57	94	0
3	Sintuk Toboh Gadang	Sintuk	74	190	0
4	Ulakan Tapakis	Ulakan	119	186	0
5	Nan Sabaris	Pauh Kambar	3	376	0
6	2x11 Enam Lingkung	Sicincin	147	148	0
		Kampung Guci	149	78	0
7	Enam Lingkung	Pakandangan	65	69	0
8	2x11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	46	110	0
		Anduring	25	95	0
9	VII Koto	Sungai Sarik	156	68	0
		Ampalu	122	50	0
10	Patamuan	Patamuan	158	250	0
11	Padang Sago	Padang Sago	122	0	0
12	V Koto Kampung Dalam	Kampung Dalam	0	347	0
		Sikucur	43	115	0
13	V Koto Timur	Padang Alai	107	78	0
		Limau Purut	42	69	0
14	Sungai Limau	Sungai Limau	0	69	0
15	Batang Gasan	Gasan Gadang	57	63	0

16	Sungai Geringging	Sungai Geringging	102	70	0
		Koto Bangko	31	172	0
17	IV Koto Aur Malintang	Batu Basa	115	149	0
Jumlah			1.920	3.933	0

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 4.7
Cakupan Pertolongan Persalinan Berdasarkan
Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2024



Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Tabel dan Grafik 4.7 dapat dilihat bahwa seluruh persalinan yaitu 5.853 kali yang terjadi pada tahun 2024 ditolong oleh tenaga kesehatan yaitu 1.920 persalinan ditolong oleh dokter dan 3.933 persalinan di tolong oleh bidan.

F. Status Gizi

Status gizi menurut Kemenkes RI dan WHO adalah

adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk metabolisme. Setiap Individu memiliki kebutuhan nutrisi harian yang harus dipenuhi, baik berdasarkan jumlah kalori yang dibutuhkan, maupun kandungan nutrisi yang dikonsumsi. Pemantauan status gizi pada balita dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap posyandu adalah dengan menggunakan indikator memuat sasaran disuatu wilayah (S), Balita yang memiliki KMS (K), Balita yang ditimbang berat badannya (D), Balita yang ditimbang dan naik berat badannya (N), disingkat menjadi SKDN. Pada Tahun 2023 status gizi balita yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

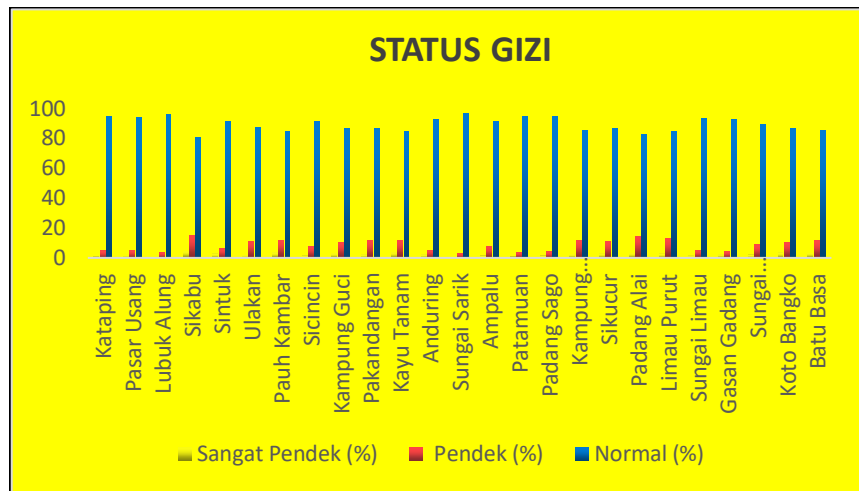
Tabel 4.8
Cakupan Status Gizi Masyarakat Berdasarkan
Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Padang
Pariaman

No	Kecamatan	Puskesmas	Status Gizi Menurut TB/U		
			Sangat Pendek (%)	Pendek (%)	Normal (%)
1	Batang Anai	Kataping	0,88	4,67	94,22
		Pasar Usang	0,98	4,98	94,04
2	Lubuk Alung	Lubuk Alung	0,49	3,59	95,69
		Sikabu	4,43	14,77	80,8
3	Sintuk Toboh Gadang	Sintuk	2,64	5,98	91,29
4	Ulakan Tapakis	Ulakan	1,78	11,1	87,03
5	Nan Sabaris	Pauh Kambar	3,53	11,91	84,45
6	2x11 Enam Lingkung	Sicincin	1,45	7,45	91
		Kampung	3,07	10,54	86,21

		Guci			
7	Enam Lingkung	Pakandangan	2,2	11,61	86,19
8	2x11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	3,63	11,73	84,64
		Anduring	2,21	5,11	92,67
9	VII Koto	Sungai Sarik	0,31	3,12	96,51
		Ampalu	1,38	7,32	91,16
10	Patamuan	Patamuan	0,83	3,83	94,84
11	Padang Sago	Padang Sago	1,38	4,13	94,5
12	V Koto Kampung Dalam	Kampung Dalam	2,48	11,45	85,42
		Sikucur	2,81	10,93	86,26
13	V Koto Timur	Padang Alai	3,19	14,5	82,31
		Limau Purut	2,68	13	84,32
14	Sungai Limau	Sungai Limau	1,51	5,11	93,33
15	Batang Gasan	Gasam Gadang	2,29	4,43	92,81
16	Sungai Geringging	Sungai Geringging	1,96	8,65	89,36
		Koto Bangko	3,31	10,38	86,3
17	IV Koto Aur Malintang	Batu Basa	3,24	11,38	85,13
Jumlah			1,90	7,65	90,3

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 4.6 Cakupan Status Gizi Masyarakat Berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas



Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Dari grafik di atas diketahui status gizi masyarakat di kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sudah baik yang dapat dilihat status gizi menurut Tinggi Badan / Umur sudah dalam batas normal sebanyak 90,30%.

G. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Upaya Kesehatan Ibu dan Anak adaah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas ,ibu menyusui, bayi dan anak Balita prasekolah. Program kesehatan ibu dan anak (KIA) mempunyai kemampuan hidup sehat melalui peningkata derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) serta meningkatkan derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.

PWS KIA bertujuan untuk memantau secara rutin terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, mulai dari ANC sampai persalinannya serta kesehatan anaknya. Pemantauan yang dilaksanakan adalah

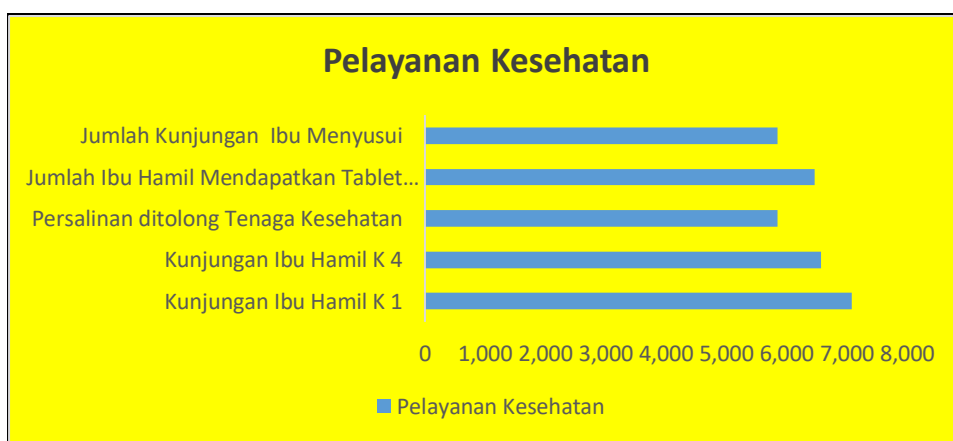
pemantauan K1,K4, deteksi resti oleh Nakes, kunjugan neonatus , persalinan oleh Nakes. Pada Tahun 2024 jumlah pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 4.9
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

Tahun	Pelayanan KIA	Total
2024	Kunjungan Ibu Hamil K 1	7.079
	Kunjungan Ibu Hamil K 4	6.569
	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	5.853
	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Tambah Darah	6.471
	Jumlah Kunjungan Ibu Menyusui	5.853

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 4.9
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Dari grafik di atas diketahui jumlah pelayanan KIA pada Tahun 2024 sudah memenuhi target, Persalinan sudah 100% di tolong oleh tenaga kesehatan. Pencapaian ini terlaksana karena adanya jalinan

kerjasama yang baik dalam melaksanakan pemantauan wilayah setempat antara Puskesmas dan Bidan Praktek swasta (BPS) yang berpraktek di wilayah kerja Puskesmas, sehingga kualitas dan kuantitas pemantauan dan pelaporan dari BPS ke Puskesmas lebih maksimal.

H. Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penaggulangan kelahiran seperti: kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Keluarga berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal anak, mengatur kehamilan, membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKKBN, 2015). Berikut ini data mengenai Akseptor Keluarga Berencana (KB) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Pencapaian Peserta KB Baru (Kumulatif) di
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	PENCAPAIAN PER MIX KONTRASEPSI								Jumlah
		PPM PB	IUD	MO W	MO P	KDM	Implan t	STK	Pil	
1	LUBUK ALUNG	1.244	30	1	0	351	202	622	395	1601
2	BATANG ANAI	1.421	21	0	0	134	133	454	278	1020
3	NAN SABARIS	708	51	0	0	107	80	305	154	697
4	2 X 11 ENAM LINGKUANG	453	17	0	0	29	98	117	60	321

5	VII KOTO SUNGAI SARIK	958	16	0	0	274	140	549	309	1288
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	505	0	0	0	93	43	255	123	514
7	SUNGAI GARINGGIN G	787	5	0	0	42	92	344	59	542
8	SUNGAI LIMAU	531	2	0	0	61	59	159	111	392
9	IV KOTO AUR MALINTANG	503	0	0	0	36	29	93	63	221
10	ULAKAN TAPAKIH	510	24	0	0	67	57	263	105	516
11	SINTUAK TOBOH GADANG	421	26	0	0	59	53	208	104	450
12	PADANG SAGO	228	5	0	0	47	42	63	59	216
13	BATANG GASAN	169	8	0	0	77	19	148	106	358
14	V KOTO TIMUR	356	12	0	0	50	72	142	175	451
15	2 X 11 KAYU TANAM	789	50	0	0	38	75	76	63	302
16	PATAMUAN	464	30	0	0	25	59	31	31	176
17	ENAM LINGKUNG	621	30	24	0	36	30	128	73	321
JUMLAH		10.669	327	25	0	1526	1283	3957	2268	9386

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diketahui secara keseluruhan bahwa jumlah peserta KB Perempuan masih banyak yang menggunakan KB Suntik sebagai alat kontrasepsi. Sedangkan peserta KB laki-laki lebih banyak menggunakan kondom dari pada metode operasi pria (MOP).

BAB V

GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang ditempuh memungkinkan seseorang atau pihak tertentu untuk mampu berkembang secara wajar dalam aspek sosial, ekonomi, industri dan sebagainya.

Setiap penduduk Indonesia berhak atas kehidupan yang layak. Salah satunya upaya yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut adalah melalui pendidikan, dengan pencapaian pendidikan bagi semua lapisan masyarakat (*education for all*) bagi usia tua dan muda, miskin maupun kaya, baik laki-laki maupun perempuan.

Di Kabupaten Padang Pariaman status Pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan Jumlah sertifikasi guru, dimana kesenjangan gender dapat dilihat dari representasi perempuan dan laki-laki pada indikator tersebut.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD,SLTP,SLTA dan Sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai, Angka APK dinyatakan dalam persentase. Angka hasil perhitungan tersebut (APK) digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Berikut ini data angka partisipasi kasar (APK) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 5.1

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD

TAHUN 2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 5.1 di atas Angka Partisipasi Kasar (APK)

No	KECAMATAN	SD		
		L	P	L+P
1	LUBUK ALUNG	6,37	5,55	11,92
2	BATANG ANAI	6,57	5,99	12,56
3	NAN SABARIS	3,28	3,15	6,43
4	2X11 KAYU TANAM	3,16	2,74	5,90
5	VII KOTO SEI. SARIK	3,83	3,48	7,30
6	V KOTO KP. DALAM	2,74	2,50	5,24
7	SEI. GERINGGING	3,71	3,47	7,18
8	SEI. LIMAU	3,51	2,90	6,42
9	IV KOTO AMAL	2,49	2,33	4,82
10	ULAKAN TAPAKIS	1,78	1,60	3,38
11	SINTOGA	2,22	2,06	4,28
12	PADANG SAGO	0,75	0,76	1,52
13	BATANG GASAN	1,23	1,18	2,41
14	V KOTO TIMUR	1,54	1,27	2,81
15	2X11 ENAM LINGKUNG	2,03	1,90	3,93
16	PATAMUAN	2,03	1,73	3,76
17	ENAM LINGKUNG	2,40	1,97	4,37
	JUMLAH	49,64	44,58	94,22

Sekolah Dasar sebanyak 94,22% yang terdiri dari 49,64% laki-laki dan 44,58 % perempuan.

Tabel 5.2
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP

TAHUN 2024

No	KECAMATAN	SMP		
		L	P	L+P
1	LUBUK ALUNG	4,18	4,51	8,69
2	BATANG ANAI	5,20	4,81	10,00
3	NAN SABARIS	2,06	1,93	3,99
4	2X11 KAYU TANAM	1,83	1,54	3,38
5	VII KOTO SEI. SARIK	2,32	2,36	4,68
6	V KOTO KP. DALAM	1,41	1,13	2,54
7	SEI. GERINGGING	2,55	2,40	4,95
8	SEI. LIMAU	2,37	2,15	4,52
9	IV KOTO AMAL	1,66	1,57	3,23
10	ULAKAN TAPAKIS	1,07	0,97	2,04
11	SINTOGA	2,05	1,96	4,01
12	PADANG SAGO	0,52	0,50	1,03
13	BATANG GASAN	0,91	0,74	1,66
14	V KOTO TIMUR	0,64	0,64	1,28
15	2X11 ENAM LINGKUNG	1,82	1,54	3,36
16	PATAMUAN	0,72	0,63	1,35
17	ENAM LINGKUNG	1,73	1,54	3,27
	JUMLAH	33,05	30,92	63,97

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 5.2 di atas Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 63,97% yang terdiri dari 33,05% laki-laki dan 30,92 % perempuan.

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap Lembaga Pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka

Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berikut ini data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini.

Tabel. 5.3
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
KELOMPOK UMUR (7-12TAHUN)
TAHUN 2024

No	KECAMATAN	7-12		
		L	P	L+P
1	LUBUK ALUNG	5,91	5,26	11,17
2	BATANG ANAI	6,11	5,66	11,77
3	NAN SABARIS	3,12	3,01	6,13
4	2X11 KAYU TANAM	2,86	2,57	5,42
5	VII KOTO SEI. SARIK	3,51	3,27	6,78
6	V KOTO KP. DALAM	2,57	2,40	4,97
7	SEI. GERINGGING	3,48	3,28	6,76
8	SEI. LIMAU	3,35	2,80	6,15
9	IV KOTO AMAL	2,31	2,22	4,53
10	ULAKAN TAPAKIS	1,66	1,52	3,18
11	SINTOGA	1,98	1,97	3,95
12	PADANG SAGO	0,71	0,74	1,45
13	BATANG GASAN	1,11	1,09	2,20
14	V KOTO TIMUR	1,40	1,20	2,60
15	2X11 ENAM LINGKUNG	1,82	1,77	3,59
16	PATAMUAN	1,80	1,57	3,37

17	ENAM LINGKUNG	2,26	1,88	4,15
	JUMLAH	45,96	42,21	88,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 5.3 di atas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Dasar (SD) sebanyak 88,17% yang terdiri dari 45,96% laki-laki dan 42,21% perempuan, artinya baru 88,17% penduduk usia 12-15 tahun yang bersekolah di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Tabel. 5.4
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
KELOMPOK UMUR (13-15 TAHUN)
TAHUN 2024

No	KECAMATAN	13-15		
		L	P	L+P
1	LUBUK ALUNG	4,46	4,66	9,11
2	BATANG ANAI	5,20	4,83	10,03
3	NAN SABARIS	2,20	1,99	4,19
4	2X11 KAYU TANAM	2,19	1,69	3,88
5	VII KOTO SEI. SARIK	2,58	2,43	5,01
6	V KOTO KP. DALAM	1,58	1,20	2,79
7	SEI. GERINGGING	2,52	2,55	5,07
8	SEI. LIMAU	2,34	2,17	4,51
9	IV KOTO AMAL	1,69	1,54	3,23
10	ULAKAN TAPAKIS	1,12	1,00	2,12
11	SINTOGA	2,07	1,72	3,79
12	PADANG SAGO	0,60	0,52	1,12
13	BATANG GASAN	0,99	0,79	1,78
14	V KOTO TIMUR	0,87	0,75	1,62
15	2X11 ENAM LINGKUNG	1,89	1,59	3,48
16	PATAMUAN	1,04	0,85	1,90
17	ENAM LINGKUNG	1,67	1,48	3,15
	JUMLAH	35,00	31,77	66,77

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 5.4 di atas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 66,77% yang terdiri dari 35,00% laki-laki dan 31,77% perempuan, artinya baru 66,77% penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

C. Angka Partispasi Murni

Angka Partispasi Murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C) sangat diperhitungkan. Sedangkan kegunaan atau tujuan pengukuran APM adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Berikut ini data angka partisipasi murni (APM) menurut Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel. 5.5
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) JENJANG
PENDIDIKAN SD TAHUN 2024

No	KECAMATAN	SD		
		L	P	L+P
1	LUBUK ALUNG	5,74	5,12	10,86
2	BATANG ANAI	5,93	5,50	11,42
3	NAN SABARIS	3,00	2,95	5,95
4	2X11 KAYU TANAM	2,79	2,51	5,30
5	VII KOTO SEI. SARIK	3,45	3,21	6,66
6	V KOTO KP. DALAM	2,51	2,34	4,85
7	SEI. GERINGGING	3,36	3,20	6,56
8	SEI. LIMAU	3,24	2,71	5,96
9	IV KOTO AMAL	2,23	2,15	4,38
10	ULAKAN TAPAKIS	1,59	1,48	3,07

11	SINTOGA	1,91	1,91	3,82
12	PADANG SAGO	0,69	0,71	1,40
13	BATANG GASAN	1,08	1,08	2,16
14	V KOTO TIMUR	1,36	1,17	2,53
15	2X11 ENAM LINGKUNG	1,75	1,73	3,48
16	PATAMUAN	1,74	1,54	3,28
17	ENAM LINGKUNG	2,19	1,83	4,02
	JUMLAH	44,57	41,13	85,70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 5.4 di atas Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 85,70% yang terdiri dari 44,57% laki-laki dan 41,13% perempuan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) kecamatan Batang Anai menempati urutan pertama yaitu 11,42% dan Kecamatan Padang Sago menempati urutan terakhir yaitu 1,40%.

Tabel. 5.6
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) JENJANG
PENDIDIKAN SMP TAHUN 2024

No	KECAMATAN	SMP		
		L	P	L+P
1	LUBUK ALUNG	3,21	3,81	7,02
2	BATANG ANAI	3,90	3,83	7,73
3	NAN SABARIS	1,60	1,60	3,19
4	2X11 KAYU TANAM	1,45	1,24	2,69
5	VII KOTO SEI. SARIK	1,83	1,92	3,75
6	V KOTO KP. DALAM	1,11	0,91	2,02
7	SEI. GERINGGING	1,88	2,05	3,93
8	SEI. LIMAU	1,84	1,86	3,70
9	IV KOTO AMAL	1,21	1,21	2,42
10	ULAKAN TAPAKIS	0,76	0,80	1,56
11	SINTOGA	1,49	1,47	2,95
12	PADANG SAGO	0,43	0,40	0,83
13	BATANG GASAN	0,74	0,62	1,36
14	V KOTO TIMUR	0,54	0,57	1,11
15	2X11 ENAM	1,33	1,23	2,56

	LINGKUNG			
16	PATAMUAN	0,46	0,47	0,94
17	ENAM LINGKUNG	1,26	1,23	2,49
	JUMLAH	25,04	25,21	50,25

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel 5.4 di atas Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 50,25% yang terdiri dari 25,04% laki-laki dan 25,21% perempuan. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kecamatan Batang Anai menempati urutan pertama yaitu 7,73% dan Kecamatan Patamuan menempati urutan terakhir yaitu 0,94%.

D. Angka Putus Sekolah

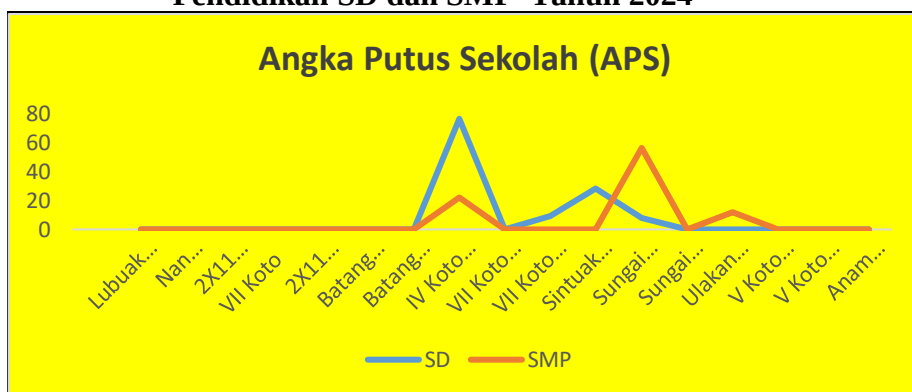
Putus sekolah secara umum dapat diartikan sebagai orang/anak yang keluar dalam suatu sistem pendidikan sebelum mereka menamatkan pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti. Dengan demikian putus sekolah dapat pula diartikan tidak tamat/gagal dalam belajar ketingkat lanjut. Dan biasanya orang yang gagal dalam suatu proses kegiatan pendidikan yang terkait dengan tingkat jenjang maupun waktu belajar sebagaimana telah ditetapkan dapat di kategorikan sebagai orang yang gagal dalam pendidikan ataupun putus sekolah. Berikut adalah data Angka Putus Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, dapat dilihat paa tabel dan grafik.

Tabel. 5.7
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SD dan SMP
Tahun 2024

No	Kecamatan	SD	SMP
1	Lubuak Aluang	0	0
2	Nan Sabaris	0	0
3	2X11 Anam Lingkung	0	0
4	VII Koto	0	0
5	2X11 Anam Lingkung	0	0
6	Batang Anai	0	0
7	Batang Gasan	0	0
8	IV Koto Aua Malintang	76	22
9	VII Koto Padang Sago	0	0
10	VII Koto Patamuan	9	0
11	Sintuak Toboh Gadang	28	0
12	Sungai Limau	8	56
13	Sungai Garinggiang	0	0
14	Ulakan Tapakih	0	12
15	V Koto Kamppung Dalam	0	0
16	V Koto Timur	0	0
17	Anam Lingkuang	0	0
JUMLAH		121	90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman

Grafik. 5.8
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang
Pendidikan SD dan SMP Tahun 2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman

Berdasar data tabel dan grafik 5.4, Angka putus sekolah di

kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 121 orang dan pada jenjang pendidikan SMP sebanyak 90 orang.

E. Sertifikasi Guru.

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Tujuan utama dari sertifikasi guru ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk mendapatkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kompetensi dalam standar kompetensi guru. Berikut ini dapat kita lihat pada tabel berdasarkan jumlah guru yang telah mendapati sertifikasi Pada Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

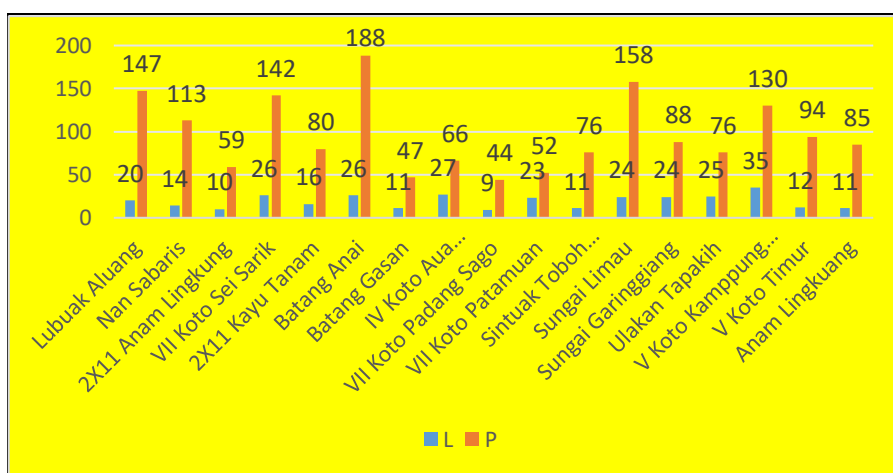
Tabel. 5.9
Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Lubuak Aluang	20	147	167
2	Nan Sabaris	14	113	127
3	2X11 Anam Lingkung	10	59	69
4	VII Koto Sei Sarik	26	142	168
5	2X11 Kayu Tanam	16	80	96
6	Batang Anai	26	188	214
7	Batang Gasan	11	47	58
8	IV Koto Aua Malintang	27	66	93
9	VII Koto Padang Sago	9	44	53
10	VII Koto Patamuan	23	52	75
11	Sintuak Toboh Gadang	11	76	87
12	Sungai Limau	24	158	182
13	Sungai Garinggiang	24	88	112
14	Ulakan Tapakih	25	76	101
15	V Koto Kampung	35	130	165

	Dalam			
16	V Koto Timur	12	94	106
17	Enam Lingkuang	11	85	96
Jumlah		324	1645	1969

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman

Grafik . 5.10
Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang
Pendidikan SD Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman

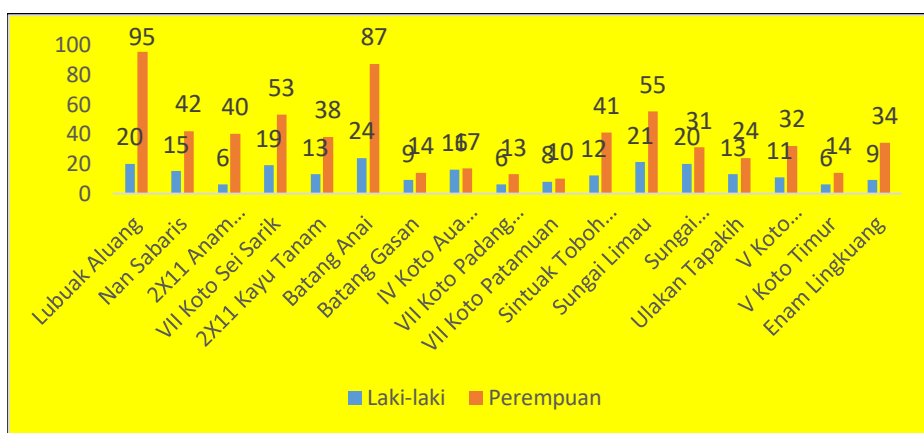
Tabel. 5.11
Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang
Pendidikan SMP Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

No.	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Lubuak Aluang	20	95	115
2	Nan Sabaris	15	42	57
3	2X11 Anam Lingkung	6	40	46
4	VII Koto Sei Sarik	19	53	72
5	2X11 Kayu Tanam	13	38	51
6	Batang Anai	24	87	111
7	Batang Gasan	9	14	23

8	IV Koto Aua Malintang	16	17	33
9	VII Koto Padang Sago	6	13	19
10	VII Koto Patamuan	8	10	18
11	Sintuak Toboh Gadang	12	41	36
12	Sungai Limau	21	55	76
13	Sungai Garinggiang	20	31	51
14	Ulakan Tapakih	13	24	37
15	V Koto Kamppung Dalam	11	32	43
16	V Koto Timur	6	14	20
17	Enam Lingkuang	9	34	43
Jumlah		228	640	868

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman

Grafik. 5.12
Jumlah Guru Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang
Pendidikan SMP Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Padang Pariaman

Berdasarkan pada Tabel dan grafik 5.11 dan 5.12 di atas dapat dilihat bahwa, Pada tahun 2024 jumlah Guru SD yang sudah memiliki sertifikasi berjumlah 1.969 yang terdiri dari 324 guru laki-laki dan 1.645 guru perempuan. Sedangkan untuk Guru SMP yang sudah memiliki sertifikasi di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 868

Guru dengan Guru laki-laki sebanyak 228 dan Guru perempuan 640 Orang.

BAB VI

GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang ekonomi memiliki tujuan supaya perempuan dan laki-laki mendapat hak, akses, manfaat dan partisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat mendukung pembangunan ekonomi yang maksimal. Pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja seringkali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh Pemerintah. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 Tenaga Kerja yakni setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sementara itu *International Labour Organization* (ILO) menjelaskan bahwa Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja yang berusia antara 15–64 tahun. Di Kabupaten Padang Pariaman status ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: Tenaga Kerja Migran, Pekerja Sektor Formal, Pekerja Sektor Informal, Keanggotaan Koperasi dan Serikat Pekerja.

A. Tenaga Kerja Migran

Tenaga kerja migran merupakan seseorang yang telah bermigrasi dari suatu negara ke negara yang lain. Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 pekerja migran telah dilindungi oleh negara bagi pekerja yang hendak bekerja di dalam maupun luar negeri. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah pekerja migran setiap

tahun selalu ada. Berikut dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini.

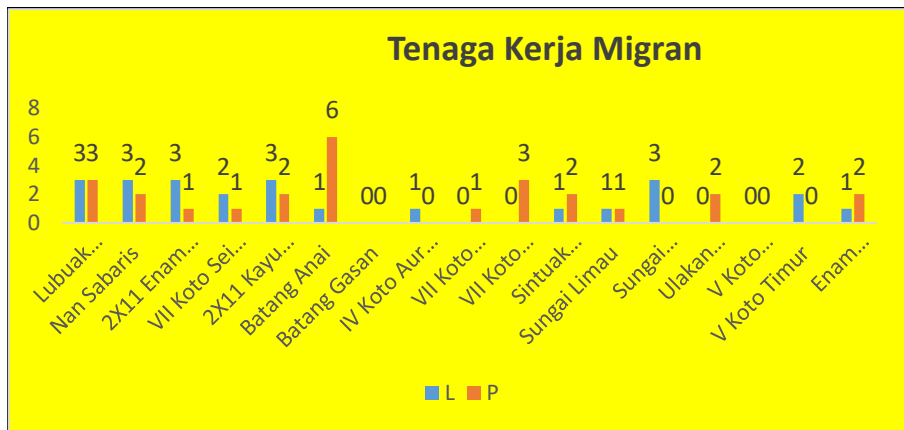
Tabel. 6.1
Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Lubuak Aluang	3	3	6
2	Nan Sabaris	3	2	5
3	2X11 Enam Lingkung	3	1	4
4	VII Koto Sei Sarik	2	1	3
5	2X11 Kayu Tanam	3	2	5
6	Batang Anai	1	6	7
7	Batang Gasan	0	0	0
8	IV Koto Aur Malintang	1	0	1
9	VII Koto Padang Sago	0	1	1
10	VII Koto Patamuan	0	3	3
11	Sintuak Toboh Gadang	1	2	3
12	Sungai Limau	1	1	2
13	Sungai Geringging	3	0	3
14	Ulakan Tapakih	0	2	2
15	V Koto Kamppung Dalam	0	0	0
16	V Koto Timur	2	0	2
17	Enam Lingkuang	1	2	3
Jumlah		24	26	50

Sumber: Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Grafik. 6.1
Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)

di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber: Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 50 Pekerja Migran yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 24 orang pekerja migran Laki-laki dan 26 Orang pekerja migran Laki-Laki.

B. Pekerja Sektor Formal

Pekerja di sektor formal merupakan pegawai (ASN) yang bekerja di instansi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial, bidang pendidikan, jasa kesehatan, transportasi, dan pergudangan, serta menyediakan akomodasi dan makanan minuman maupun industri pengolahan. Berikut dapat dilihat tabel dan pada grafik Jumlah pekerja sektor formal di kabupaten Padang Pariaman tahun 2024.

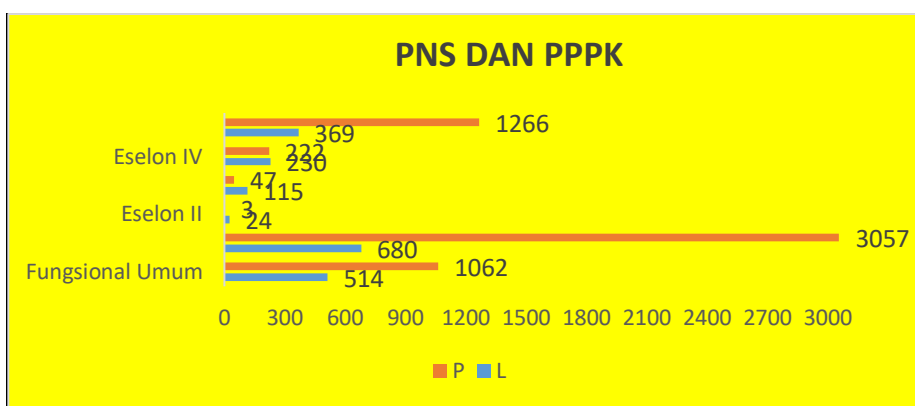
Tabel. 6.2
Jumlah ASN dan PPPK Menurut Jabatan
Tahun 2024

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Fungsional Umum	514	1062	1576
2	Fungsional Tertentu	680	3057	3737
3	Eselon II	24	3	27

4	Eselon III	115	47	162
5	Eselon IV	230	222	452
6	PPPK	369	1266	1635
Jumlah		1932	5657	7589

Sumber: BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman

Grafik. 6.2
Jumlah ASN dan PPPK Menurut Jabatan
Tahun 2024



Sumber: BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 7.589 orang ASN dan PPPK yang bekerja di kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 1.932 laki-laki dan 5.657 perempuan.

C. Pekerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal merupakan seseorang yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian. Contoh pekerja informal : Pedagang kaki lima, supir angkot, dan tukang becak.

Tabel. 6.3
Jumlah Angkatan Kerja (Usia >15 Tahun) Per Kecamatan

Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Lubuak Aluang	11.512	11.208	22.720
2	Batang Anai	12.857	12.602	25.459
3	Nan Sabaris	7.212	7.280	14.492
4	2X11 Enam Lingkung	4.331	4.402	8.733
5	VII Koto Sei Sarik	8.661	8.681	17.342
6	V Koto Kamppung Dalam	5.722	5.629	11.351
7	Sungai Geringging	7.761	7.702	15.463
8	Sungai Limau	7.216	7.060	14.276
9	IV Koto Aur Malintang	5.039	5.118	10.157
10	Ulakan Tapakih	4.952	4.880	9.832
11	Sintuak Toboh Gadang	4.745	4.800	9.545
12	VII Koto Padang Sago	2.063	2.135	4.198
13	Batang Gasan	2.703	2.594	5.297
14	V Koto Timur	3.498	3.441	6.939
15	2X11 Kayu Tanam	6.622	6.573	13.195
16	VII Koto Patamuan	4.203	4.221	8.424
17	Enam Lingkuang	4.859	4.894	9.753
Jumlah		103.956	103.220	207.176

Sumber: Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Grafik. 6.3
Jumlah Angkatan Kerja (Usia >15 Tahun) Per Kecamatan

Tahun 2024



Sumber: Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan pada tabel dan grafik di atas dapat diketahui Jumlah Angkatan Kerja (Usia >15 Tahun) Per Kecamatan Tahun 2024 tertinggi di kecamatan Batang Anai sebesar 25.459 orang dan yang terendah di kecamatan Padang Sago sebesar 4.198 orang.

D. Usaha Mikro

Usaha Mikro di Kabupaten Padang Pariaman berkembang pesat dan di dominasi oleh perempuan.

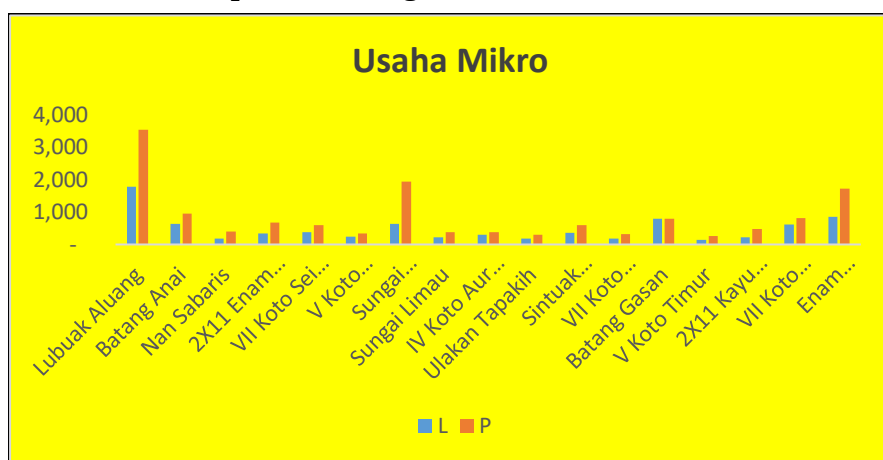
Tabel. 6.4
Data Usaha Mikro Berdasarkan Jenis Kelamin
di kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No		L	P	Jumlah
1	Lubuak Aluang	1.783	3.533	5.316
2	Batang Anai	635	954	1.589
3	Nan Sabaris	173	405	578
4	2X11 Enam Lingkung	329	677	1.006
5	VII Koto Sei Sarik	381	588	969
6	V Koto Kampung	236	348	584

	Dalam			
7	Sungai Geringging	642	1.938	2.580
8	Sungai Limau	227	374	601
9	IV Koto Aur Malintang	297	383	680
10	Ulakan Tapakih	176	297	473
11	Sintuak Toboh Gadang	362	590	952
12	VII Koto Padang Sago	184	317	501
13	Batang Gasan	796	787	1.583
14	V Koto Timur	134	252	386
15	2X11 Kayu Tanam	216	480	696
16	VII Koto Patamuan	617	802	1.419
17	Enam Lingkuang	848	1.712	2.560
Jumlah		8.036	14.437	22.473

Sumber: Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Grafik. 6.4
Data Usaha Mikro Berdasarkan Jenis Kelamin
di kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber: Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui jumlah Usaha Mikro terbanyak tahun 2024 terdapat di kecamatan Sungai Geringging yang terdiri dari 642 laki-laki dan 1.938 perempuan.

Jumlah Usaha Mikro terendah terdapat di kecamatan V Koto Timur yang terdiri dari 134 laki-laki dan 252 perempuan.

E. Serikat Pekerja

Serikat pekerja merupakan organisasi yang hadir untuk melindungi hak karyawan atau buruh. Serikat pekerja telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil dari penelitian Hermawan (2008:139) yang di dasari dari mimbar hukum fakultas Universitas Gajah Mada. Tujuan didirikan serikat pekerja lebih bersifat sosial ekonomi daripada politis. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja, menyertakan bahwa tujuan didirakannya serikat pekerja adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja / buruh dan keluarganya. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah serikat pekerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel. 6.5
Keanggotaan Serikat Pekerja Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Laki -Laki	Perempuan	Jumlah
1	PT. Coca Cola Boatling Indonesia	124	6	130
2	PT. BUMI SARIMAS INDONESIA	125	100	225
3	PT. SUMATERA TROPICAL SPICES	50	38	88
Total		299	144	443
4	PT. JAYA SENTRIKON INDONESIA	Tidak Ada Sertifikat Pekerja		
5	PT. USAHA INTI	Tidak Ada Sertifikat Pekerja		

	PADANG	
6	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	Tidak Ada Sertifikat Pekerja
7	PT. AGRIMITRA UTAMA PERSADA	Tidak Ada Sertifikat Pekerja
8	SPSI SUNGAI BULUH SELATAN	Tidak Ada Sertifikat Pekerja
9	PT. KUNANGO JANTAN	Tidak Ada Sertifikat Pekerja

Sumber: Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 9 perusahaan yang ada di kabupaten Padang Pariaman hanya 3 perusahaan yang memiliki serikat pekerja dan 6 perusahaan belum memiliki serikat pekerja.

BAB VII

GENDER BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam konteks politik dan pengambilan keputusan, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan

Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga Negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan diseluruh negeri. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Beberapa waktu terakhir isu kesetaraan Gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan.

Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan.

A. Partisipasi di Lembaga Legislatif

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Di Kabupaten Padang Pariaman jumlah Anggota DPRD sebanyak 40 orang tanpa adanya perwakilan Perempuan. Berdasarkan perolehan data dari KPU Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari beberapa partai politik di antaranya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

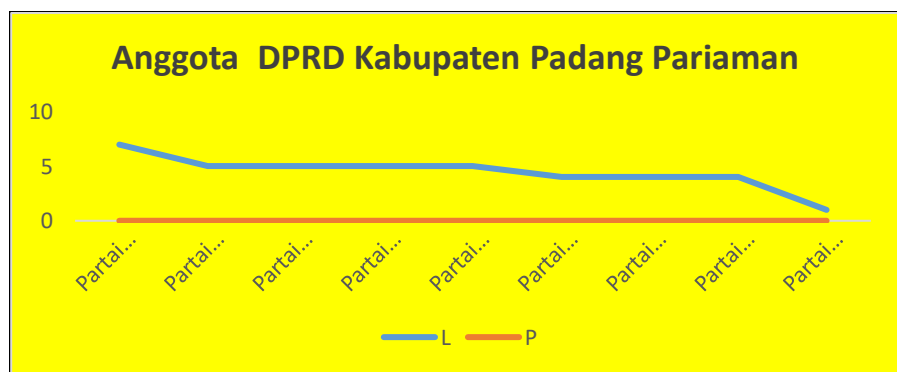
Tabel 7.1
Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Menurut
Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Partai	Anggota DPRD Kabupaten		
		L	P	L+P
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	7	0	7
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5	0	5

3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	0	5
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	0	5
5	Partai Nasdem	5	0	5
6	Partai Demokrat	4	0	4
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	0	4
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	0	4
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1	0	1
	Jumlah	40	0	40

Sumber: Data Kesbangpol kabupaten Padang Pariaman

Grafik 7.1
Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Menurut
Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: Data Kesbangpol kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan dari tabel dan grafik dapat diketahui bahwa dari 40 orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2024 - 2029 belum ada keterwakilan perempuan di parlemen. Peran keterwakilan perempuan pada masa pencalonan legislatif sudah memenuhi angka kuota 30%, tetapi pada faktanya pada Pemilu Legislatif tidak ada satupun Caleg perempuan yang mampu menduduki kursi Parelement di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Partisipasi di Lembaga Yudikatif

1. Kejaksaan Negeri

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2004. Berdasarkan data dari Kejaksaan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 jumlah anggota kejaksaan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini

Tabel. 7.2
Anggota Kejaksaan Fungsional di Kejaksaan Negeri Pariaman
Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jaksa Madya	1	0
Jaksa Muda	6	6
Ajun Jaksa	5	3
Ajun Jaksa Madya	1	2

Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman

Grafik. 7.2
Anggota Kejaksaan Fungsional di Kejaksaan Negeri Pariaman
Tahun 2024



Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman

Berdasarkan grafik dan tabel di atas dapat diketahui jumlah jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Pariaman berjumlah 24 orang yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.

2. Pengadilan Negeri

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 9 KUHAP, mengadili merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Berdasarkan data dari pengadilan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 jumlah anggota hakim dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 7.3
Jumlah Hakim Menurut Jenis Kepangkatan dan Kelamin
di Pengadilan Negeri Pariaman Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Ketua Pengadilan	1	0
Wakil Ketua Pengadilan	1	0
Hakim Madya Pratama		2
Hakim Pratama Utama	1	1
Jumlah	3	3

Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman

Tabel 7.3
Jumlah Hakim Menurut Jenis Kepangkatan dan Kelamin
di Pengadilan Negeri Pariaman Tahun 2024



Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman

Berdasarkan dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 6 orang hakim di kantor Pengadilan Negeri Pariaman yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

3. Pengadilan Agama

Tabel 7.4
Jumlah Hakim Menurut Jenis Kepangkatan dan Kelamin
di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024

Jenis Jabatan Hakim	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Perdata Agama	7	0
Jumlah	7	0

Sumber : Pengadilan Agama Pariaman

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 7 orang hakim di kantor Pengadilan Agama Pariaman yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 0 orang perempuan dengan jabatan Hakim Perdata Agama.

4. Polri

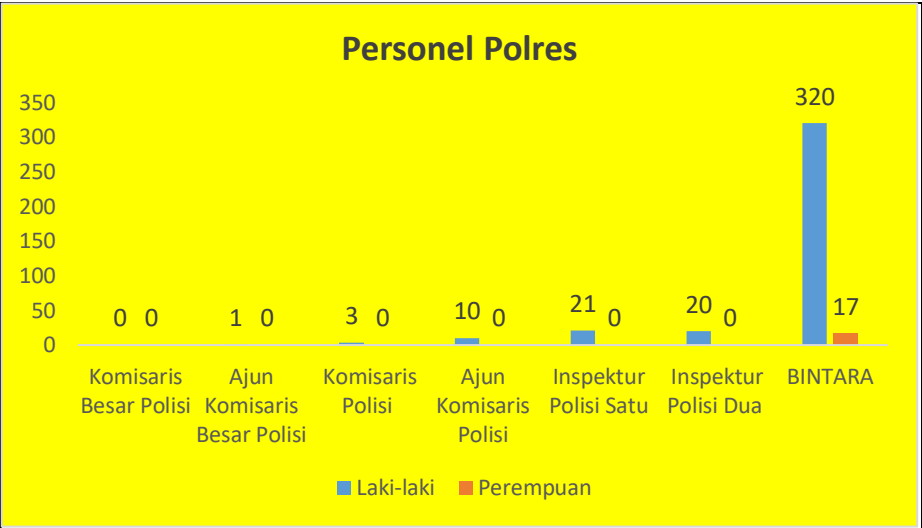
Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan , pengyoman, dan pelayananan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 (satu). berdasarkan data dari Kepolisian Resort Padang Pariaman pada tahun 2024, jumlah anggota kepolisian dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 7.5
Data Personil Polres Kabupaten Padang Pariaman Menurut Jenis
Kepangkatan dan Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kepangkatan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
	PERWIRA TINGGI (PATI)			
1	Jenderal Polisi	0	0	0
	Komisaris Jenderal Polisi	0	0	0
	Inspektur Jendral Polisi	0	0	0
	Brigadir Jenderal Polisi	0	0	0
	PERWIRA MENENGAH (PAMEN)			
2	Komisaris Besar Polisi	0	0	0
	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	0	1
	Komisaris Polisi	3	0	3
	PERWIRA PERTAMA (PAMA)			
3	Ajun Komisaris Polisi	10	0	10
	Inspektur Polisi Satu	21	0	21
	Inspektur Polisi Dua	20	0	20
4	BINTARA	320	17	337
5	TAMTAMA	0	0	0
Jumlah		375	17	392

Sumber : Data Kepolisiann Resort Kabupaten Padang Pariaman

Grafik 7.5
Data Polres Padang Pariaman Menurut Jenis Kepangkatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Data Kepolisiann Resort Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui jumlah Polisi yang ada di Polres Kabupaten Padang Pariaman di Tahun 2024 berjumlah 392 Personel Polri yang terdiri dari 376 personel adalah laki-laki dan 17 orang personel perempuan.

Tabel 7.6
Data Personil Polres Kota Pariaman Menurut Jenis Kepangkatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kepangkatan	Jenis Kelamin		L+P
		L	P	
	PERWIRA TINGGI (PATI)			
1	Jenderal Polisi	0	0	0
	Komisaris Jenderal Polisi	0	0	0
	Inspektur Jendral Polisi	0	0	0
	Brigadir Jenderal Polisi	0	0	0

PERWIRA MENENGAH (PAMEN)				
2	Komisaris Besar Polisi	0	0	0
	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	0	1
	Komisaris Polisi	1	0	1
PERWIRA PERTAMA (PAMA)				
3	Ajun Komisaris Polisi	12	1	13
	Inspektur Polisi Satu	15	0	15
	Inspektur Polisi Dua	14	0	14
4	BINTARA	330	0	330
5	TAMTAMA	0	0	0
Jumlah		374	1	375

Sumber : Data Kepolisian Resort Kota Pariaman

C. Partisipasi di Lembaga Eksekutif

1. Camat

Camat merupakan perangkat daerah yang memimpin kecamatan. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan. Camat merupakan perpanjangan tangan dari Bupati yang ada di kecamatan dan bertanggung jawab atas kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor BPKSDM kabupaten Padang Pariaman , jumlah camat Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

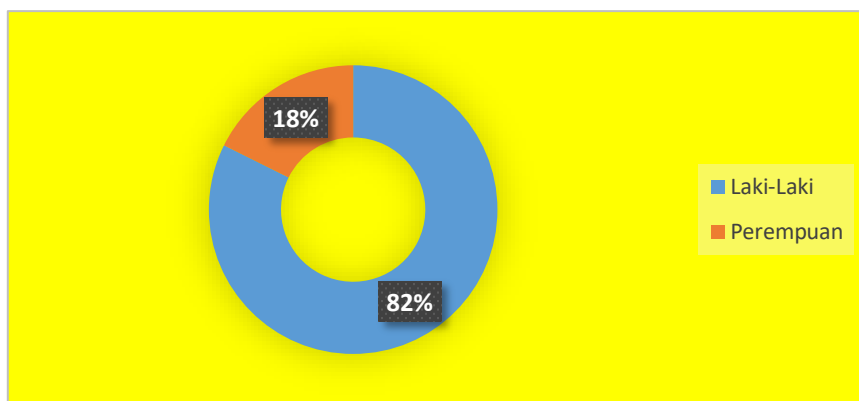
Tabel 7.7
Data Jumlah Camat se- kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Lubuak Aluang	1	0

2	Nan Sabaris T	1	0
3	2X11 Anam Lingkung	1	0
4	VII Koto Sei Sarik	1	0
5	2X11 Kayu Tanam	1	0
6	Batang Anai	1	0
7	Batang Gasan	1	0
8	IV Koto Aua Malintang	1	0
9	VII Koto Padang Sago	0	1
10	VII Koto Patamuan	1	0
11	Sintuak Toboh Gadang	0	1
12	B Sungai Limau	1	0
13	Sungai Garinggiang	1	0
14	G Ulakan Tapakih	1	0
15	a V Koto Kampung Dalam	1	0
16	V Koto Timur	1	0
17	S Anam Lingkuang	1	0
Jumlah		14	3

umber : BPKS
DM Kabupaten Padang Pariaman

Grafik .7.7
Data Jumlah Camat Padang Pariaman
Tahun 2024



Sumber : BPKSDM Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel dan grafik di atas , persentase camat laki-laki lebih besar dibandingkan camat perempuan yaitu 82% camat laki - laki dan 18% camat perempuan.

2. Wali Nagari

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong/korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan Jorong dan masyarakat melalui pemilihan wali nagari (Pilwana) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMD Kabupaten Padang Pariaman, jumlah nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman adalah 103 Nagari.

Tabel. 7.8
Data Jumlah Nagari Padang Pariaman
Tahun 2024

No	KECAMATAN	NAGARI	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	LUBUK ALUNG	1. Lubuk Alung	V	
		2. PungguangKasiak	V	
		3. PasieLaweh	V	
		4. AieTajun	V	
		5. Sikabu	V	
		6. Sungai Abang	V	
		7. Singguliang	V	
		8. Salibutan	V	
		9. Balah Hilie	V	
2	NAN SABARIS	1. Kapalo Koto	V	
		2. Pauah Kamba	V	
		3. Padang Bintungan	V	
		4. Kuraitaji	V	
		5. Sunua	V	
		6. Padang Kandang	V	
		7. Sunua Tengah	V	
		8. Sunua Barat	V	
		9. Kuraitaji Timur	V	
3	2X11 ENAM LINGKUNG	1. Sicincin	V	
		2. Lubuak Pandan	V	
		3. Sungai Asam	V	
4	VII KOTO SEI. SARIK	1. Balah Aie	V	
		2. Sungai Sariak		V
		3. Lurah Ampalu	V	
		4. Lareh Nan Panjang	V	
		5. Lareh Nan Panjang Selatan	V	
		6. Lareh Nan Panjang Barat	V	
		7. Ambuang Kapua Sungai Sariak	V	
		8. Basati Sungai Sariak	V	

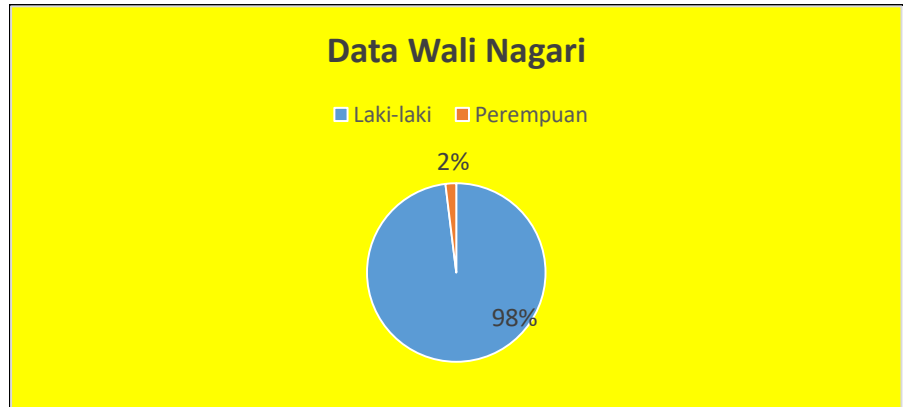
		9. Lareh Nan Panjang Sungai Sariak		V
		10. Limpato Sungai Sariak	V	
		11. Balah Aie Utara	V	
		12. Balah Aie Timur	V	
5	V KOTO KP. DALAM	1. Campago	V	
		2. Sikucua	V	
		3. Campago Barat	V	
		4. Campago Selatan	V	
		5. Sikucua Utara	V	
		6. Sikucua Timur	V	
		7. Sikucua Tengah	V	
		8. Sikucua Barat	V	
6	SEI. GERINGGING	1. Kuranji Hulu	V	
		2. Malai III Koto	V	
		3. Batu Gadang Kuranji Hulu	V	
		4. Sungai Sirah Kuranji Hulu	V	
7	SEI. LIMAU	1. Kuranji Hilir	V	
		2. Pilubang	V	
		3. Guguak Kuranji Hilir	V	
		4. Koto Tinggi Kuranji Hilir	V	
8	IV KOTO AMAL	1. III Koto Aur Malintang	V	
		2. III Koto Aur Malintang Utara	V	
		3. III Koto Aur Malintang Timur	V	
		4. III Koto Aur Malintang Selatan	V	
		5. Balai Baiak Malai III Koto	V	
9	BATANG ANAI	1. Katapiang	V	
		2. Kasang	V	

		3. Sungai Buluah	V	
		4. Buayan Lubuk Alung	V	
		5. Sungai Buluah Timur	V	
		6. Sungai Buluah Barat	V	
		7. Sungai Buluah Utara	V	
		8. Sungai Buluah	V	
10	BATANG GASAN	1. Malai V Suku	V	
		2. Gasan Gadang	V	
		3. Malai V Suku Timur	V	
11	V KOTO TIMUR	1. Kudu Gantiang	V	
		2. Limau Puruik	V	
		3. Gunung Padang Alai	V	
		4. Kudu Gantiang Barat	V	
12	ULAKAN TAPAKIS	1. Tapakis	V	
		2. Ulakan	V	
		3. Padang Toboh Ulakan	V	
		4. Sungai Gimba Ulakan	V	
		5. Seulayat Ulakan	V	
		6. Manggopoh Palak Gadang Ulakan	V	
		7. Sandi Ulakan	V	
		8. Kampuang	V	
		Galapuang Ulakan	V	
13	PATAMUAN	1. Sungai Durian	V	
		2. Tandikek	V	
		3. Tandikek Utara	V	
		4. Tandikek Selatan	V	
		5. Tandikek Barat	V	
		6. Kampuang Tanjung Koto	V	

		Mambang Sungai Durian		
14	ENAM LINGKUNG	1. Pakandangan	V	
		2. Koto Tinggi	V	
		3. Toboh Ketek	V	
		4. Parit Malintang	V	
		5. Gadua	V	
15	SINTOGA	1. Sintuak	V	
		2. Toboh Gadang	V	
		3. Toboh Gadang Selatan	V	
		4. Toboh Gadang Barat	V	
		5. Toboh Gadang Timur	V	
16	2X11 KAYU TANAM	1. Kayu Tanam	V	
		2. Guguak	V	
		3. Anduriang	V	
		4. Kapalo Hilalang	V	
17	PADANG SAGO	1. Koto Baru	V	
		2. Koto Dalam	V	
		3. Batu Kalang	V	
		4. Koto Dalam Barat	V	
		5. Koto Dalam Selatan	V	
		6. Batu Kalang Utara	V	

Sumber Data : DPMD Kabupaten Padang Pariaman

Garfik. 7.8
Data Jumlah Nagari Padang Pariaman
Tahun 2024



Sumber Data : DPMD Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 103 wali nagari yang ada di kabupaten Padang Pariaman, 101 orang (98%) wali nagari adalah laki-laki dan 2 Orang (2%) wali nagari berjenis kelamin perempuan.

BAB VIII

GENDER BIDANG HUKUM, SOSIAL DAN BUDAYA

A. Gender Bidang Hukum

Kesetaraan gender menjadi hal penting dalam penegakan hukum dan peradilan. Memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan memengaruhi pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan gender diperlukan di setiap rancangan program pemerintah, terutama dalam reformasi peradilan.

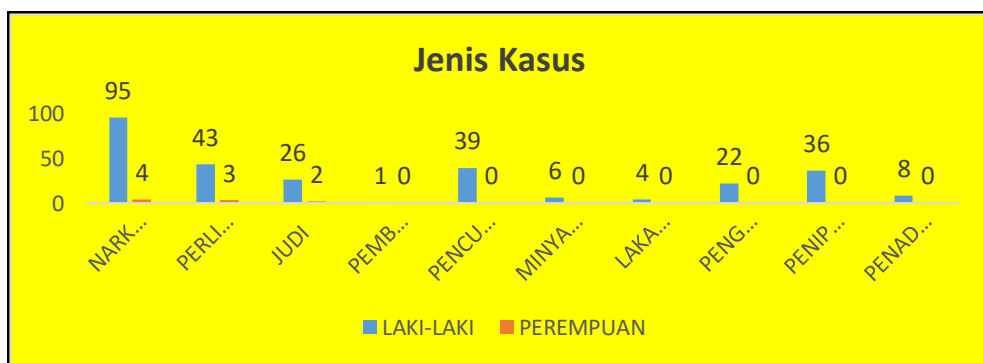
Tabel. 8.1
Jenis Kasus Yang Ditangani
Di Kejaksaan Negeri Pariaman
Tahun 2024

NO	JENIS KASUS	TERDAKWA	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN

1	NARKOBA	95	4
2	PERLINDUNGAN ANAK	43	3
3	JUDI	26	2
4	PEMBUNUHAN	1	-
5	PENCURIAN	39	-
6	MINYAK DAN GAS BUMI	6	-
7	LAKA LANTAS	4	-
8	PENGANIAYAAN	22	-
9	PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	36	-
10	PENADAHAN	8	-
JUMLAH			

Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman

Grafik. 8.1
Jenis Kasus Yang Ditangani
Di Kejaksaan Negeri Pariaman
Tahun 2024



Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dari 10 jenis kasus yang di tangani di kantor Kejaksaan Pariaman, kasus Narkoba menjadi kasus yang paling banyak di tangani yaitu 95 kasus pelaku laki-laki dan 4 kasus dengan pelaku perempuan dan kasus pembunuhan ditangani sebanyak 1

kasus dengan pelakunya laki-laki.

Tabel 8.2
Jenis Perkara Yang Ditangani
di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Perempuan	Laki-laki	Lain-Lain	Jumlah Perkara
1	Cerai Gugat	744			744
2	Cerai Talak		204		204
3	Ekonomi Syariah			2	3
4	Harta Bersama			3	3
5	Izin Poligami		1		1
6	Kewarisan			3	3
7	Pecabutan Kekuasaan Orang Tua			1	1
8	Isbat Nikah Contentius			14	14
9	Penguasaan Anak			2	2
10	Asal Usul Anak			18	18
11	Dispensasi Nikah			17	17
12	Lain-lain			3	3
13	Penetapan Ahli Waris			18	18
14	Isbat Nikah Voluntair			90	90
15	Perwalian			8	8
16	Wali Adhol			8	8
	Total	744	205	187	1.136

Sumber : Pengadilan Agama Pariaman

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus perceraian cerai gugat menjadi kasus yang terbanyak di putuskan di pengadilan agama Pariaman yaitu sebanyak 744 kasus dan 204 kasus cerai talak diputuskan di Pengadilan Agama Pariaman.

Tabel 8.3
Jenis Kasus Ynag Ditangani
Di Polres Pariaman Tahun
2024

NO	JENIS KASUS	TERDAKWA		L+P
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	PENGGELOPAN	6	0	6

2	PENGANIAYAAN	5	1	6
3	JUDI	16	0	16
4	CABUL	2	0	32
5	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	1	0	1
6	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	10	0	10
7	BBM	1	0	1
8	PENGHINAAN	2	1	3
9	PENADAH	2	0	2
10	PENCEMARAN NAMA BAIK	1	0	1
11	CURANMOR	2	0	0
12	PENCURIAN BIASA	2	0	2
13	PENIPUAN	1	0	1
14	ITE	1	0	1
15	KEKERASAN SEKSUAL	1	0	1
16	PENGRUSAKAN	1	0	1
17	TP. PEMILU	4	3	7
18	NARKOBA	65	4	69
JUMLAH		151	9	160

Sumber : Data Kepolisian Resort Kota Pariaman

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus Narkoba menjadi kasus yang terbanyak di tangani di Polres Pariaman yaitu sebanyak 65 kasus dan hanya 1 kasus kekerasan seksual yang di tangani di Polres Pariaman.

B. Bidang Sosial

1. Data Perkawinan

Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Padang Pariaman ada 3.201 perkawinan yang tercatat dan mendapatkan akta perkawinan.

Tabel. 8.4

**Cakupan Jumlah Akta Perkawinan Yang Diterbitkan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024**

No	Kecamatan	Total Penerbitan
1	Lubuak Aluang	443
2	Batang Anai	407
3	Nan Sabaris	275
4	2X11 Enam Lingkung	183
5	VII Koto Sei Sarik	243
6	V Koto Kampung Dalam	158
7	Sungai Geringging	141
8	Sungai Limau	159
9	IV Koto Aur Malintang	115
10	Ulakan Tapakih	136
11	Sintuak Toboh Gadang	168
12	VII Koto Padang Sago	74
13	Batang Gasan	57
14	V Koto Timur	84
15	2X11 Kayu Tanam	221
16	VII Koto Patamuan	127
17	Enam Lingkuang	210
Jumlah		3.201

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Grafik. 8.4
**Cakupan Jumlah Akta Perkawinan Yang Diterbitkan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 diterbitkan sebanyak 3.201 akta perkawinan yang tersebar di 17 kecamatan.

2. Data Kematian

Angka kematian penting untuk memberikan gambaran permasalahan masyarakat, seperti keadaan sosial dan ekonomi penduduk, penyebab kematian, serta hubungan dengan peristiwa kependudukan lainnya.

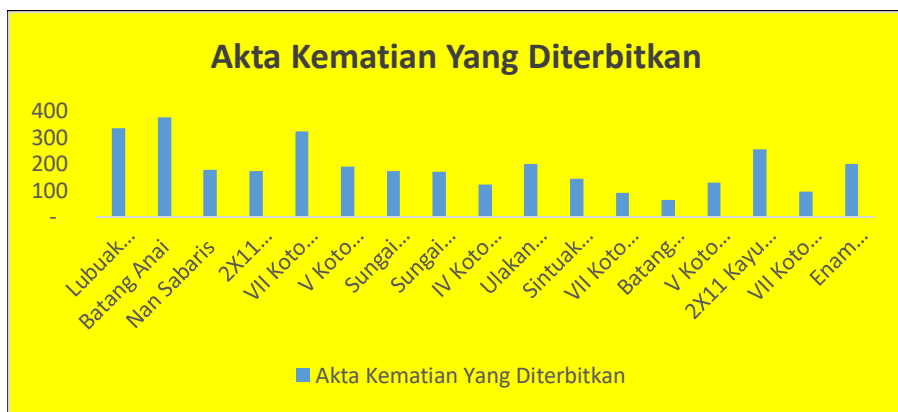
Tabel. 8.5
Cakupan Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	Total Penerbitan
1	Lubuak Aluang	336
2	Batang Anai	376
3	Nan Sabaris	179

4	2X11 Enam Lingkung	174
5	VII Koto Sei Sarik	322
6	V Koto Kampung Dalam	191
7	Sungai Geringging	173
8	Sungai Limau	170
9	IV Koto Aur Malintang	123
10	Ulakan Tapakih	199
11	Sintuak Toboh Gadang	145
12	VII Koto Padang Sago	90
13	Batang Gasan	64
14	V Koto Timur	130
15	2X11 Kayu Tanam	256
16	VII Koto Patamuan	96
17	Enam Lingkuang	199
Jumlah		3.223

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Grafik. 8.5
Cakupan Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 diterbitkan sebanyak 3.223 akta kematian yang tersebar di 17 kecamatan.

3. Data Anak

Anak merupakan individu muda yang belum mencapai usia

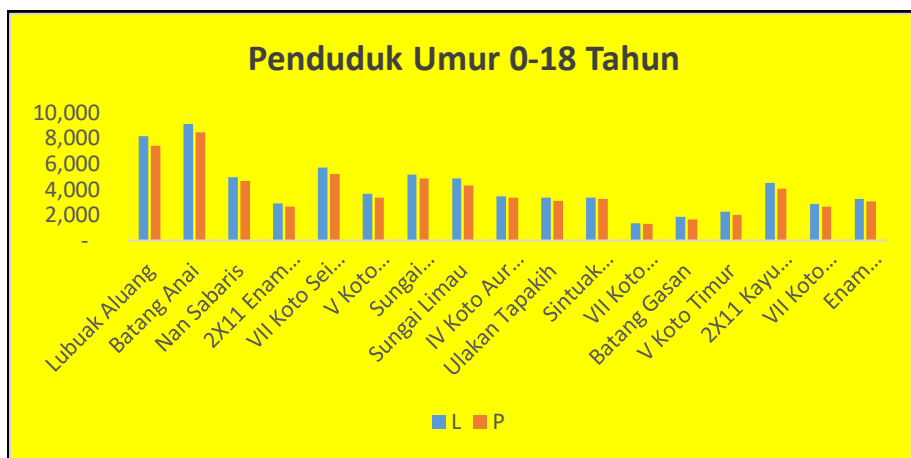
dewasa. Dalam hukum di Indonesia, anak dianggap sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Anak juga merupakan bagian penting dalam keluarga dan masyarakat, karena merekalah generasi penerus yang akan membawa perubahan di masa depan.

Tabel. 8.6
Jumlah Penduduk Umur 0-18 tahun
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Lubuak Aluang	8.154	7.430	15.584
2	Batang Anai	9.121	8.482	17.603
3	Nan Sabaris	4.958	4.634	9.592
4	2X11 Enam Lingkung	2.892	2.629	5.521
5	VII Koto Sei Sarik	5.686	5.211	10.897
6	V Koto Kampung Dalam	3.678	3.336	7.014
7	Sungai Geringging	5.179	4.844	10.023
8	Sungai Limau	4.863	4.311	9.174
9	IV Koto Aur Malintang	3.476	3.331	6.807
10	Ulakan Tapakih	3.359	3.084	6.443
11	Sintuak Toboh Gadang	3.354	3.244	6.598
12	VII Koto Padang Sago	1.361	1.285	2.646
13	Batang Gasan	1.869	1.671	3.540
14	V Koto Timur	2.276	1.996	4.272
15	2X11 Kayu Tanam	4.490	4.070	8.560
16	VII Koto Patamuan	2.856	2.637	5.493
17	Enam Lingkuang	3.276	3.049	6.325
Jumlah		70.848	65.244	136.092

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Grafik. 8.6
Jumlah Penduduk Umur 0-18 tahun
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk umur 0-18 tahun di kabupaten Padang Pariaman sebanyak 136.092 jiwa yang terdiri dari 70.848 laki-laki dan 65.244 perempuan. Jumlah penduduk usia 0-18 tahun terbanyak berada di kecamatan Batang Anai sebanyak 17.603 jiwa dan di kecamatan Batang Gasan terdapat penduduk yang paling sedikit untuk usia 0-18 tahun yaitu 3.540 jiwa.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan dalam keluarga. Sedangkan, pengasuh alternatif merupakan suatu lembaga yang

didirikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya, dan anak-anak terlantar seperti panti asuhan dan tempat penitipan anak. Berikut ini jumlah anak yang ditampung di Panti yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel. 8.7
Anak yang di Panti dan Non Panti
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki - Laki	Perempuan
1	Lubuak Aluang	71	35
2	Nan Sabaris	13	16
3	2 X 11 Anam Lingkuang	33	7
4	VII Koto	23	17
5	2 X 11 Kayu Tanam	20	19

Sumber: Dinas SosialP3A Kabupaten Padang Pariaman

5. Respon Kasus Korban

Tabel. 8.8
Respon Kasus (Korban) Anak

Kasus 2023	Jumlah	
	L	P
Persetubuhan	0	6
Sodomi	1	0
Penganiayaan	0	1
Pemeriksaan	0	1
Pergaulan Bebas	0	1
Pelecehan	0	1
S Pencabulan	0	1
Pornografi	0	1
Jumlah	0	12

Sumber: Dinas SosialP3A Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel di atas terlihat bahwa yang menjadi korban dari 10 jenis kasus yang di di Kabupaten Padang Pariaman mayoritas di

alami oleh perempuan. Dari 10 kasus tersebut paling banyak kasus yang di tangani oleh Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman adalah kasus persetubuhan dan Sodomie yang selalu ada di setiap tahunnya.

6. Respon Kasus Pelaku

Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagian besar berasal dari orang terdekat korban karena memang memahami sifat, tingkah laku dan kebiasaan korban, serta pelaku juga berasumsi bahwa korban tidak akan mengadu atau melaporkannyakepada keluarga, lingkungan maupun pihak berwajib. Berikut ini kasus pelaku yang ada di Kabupaten Padang Pariamandapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 8.9
Kasus Kekerasan
Kabupaten Padang Pariaman

Jenis Kasus	2022	2023	2024
Anak	22	28	39
Perempuan Dewasa	0	0	4
Jumlah	22	28	43

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman

Grafik. 8.9
Kasus Kekerasan
Kabupaten Padang Pariaman



Tabel 8.10
Pelaku berdasarkan Hubungan Dengan Korban
Tahun 2024

Jenis Pelaku	Anak	Dewasa
Orang Tua	3	
Keluarga /Saudara	4	
Suami/Istri	0	
Tetangga	21	2
Pacar/Teman	8	2
Guru	0	
Majikan	0	
Rekan Kerja	0	2
Lainnya	9	

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman

C. Bidang Budaya

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi secara signifikan pada iklim, suhu, udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan efek rumah kaca pada atmosfer bumi. Kondisi iklim di Kabupaten

Padang Pariaman termasuk beriklim tropis yang memiliki musim kering yang pendek dan daeah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut.

Secara hidrologi potensi pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kabupaten Padang Pariaman tersedia lebih cukup karena dangkalnya air tanah di wilayah ini. Selain itu Padang Pariaman juga dilalui oleh 11 buah aliran sungai, dengan sungai terpanjang yaitu sungai Batang Anai sepanjang 54,6 Km yang kontribusinya cukup besar dalam memenuhi kebutuhan air.

Secara geologis Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia, yaitu Lempeng Eurasian dan Lempeng Indo-Australia dan topografinya yang dilalui oleh banyak air anak-anak sungai, maka Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang rawan bencana. Bencana yang sering terjadi diKabupten Padang Pariaman meliputi Bencana seperti Banjir, longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi, gempa dan tsunami.

Tabel 8.11
Dampak Bencana Lingkungan
Tahun 2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Korban
1	Abrasi	90
2	Banjir	26.401
3	Banjir Bandang	42
4	Gempa Bumi	0
5	Kebakaran Hutan	0
6	Tanah Longsor	209
7	Orang Hilang	4
8	Angin Puting Beliung	16
9	Cuaca Ekstrim	0
10	Tenggelam	2

Jumlah	26.764
---------------	---------------

Sumber: BPBD Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel di atas terlihat bahwa di kabupaten Padang Pariaman tahun 2024, bencana banjir merupakan bencana yang memiliki dampak yang besar yaitu sebanyak 26.401 jiwa.

Tabel 8.12
Korban Masalah Sosial Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2024

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	KECAMATAN
1	LONGSOR	2 X 11 KAYU TANAM
2	BANJIR	ULAKAN TAPAKIS
3	LONGSOR	2 X 11 KAYU TANAM
4	LONGSOR	2 X 11 KAYU TANAM
5	LONGSOR	2 X 11 KAYU TANAM
6	KELOMPOK RENTAN (KURANG MAMPU)	SUNGAI LIMAU
7	KELOMPOK RENTAN (KURANG MAMPU)	2 X 11 KAYU TANAM
8	KELOMPOK RENTAN (KURANG MAMPU)	IV KOTO AUR MALINTANG
9	KELOMPOK RENTAN (KURANG MAMPU DISABILITAS)	SUNGAI LIMAU
10	KEBAKARAN RUMAH WARGA	SUNGAI LIMAU
11	KEBAKARAN RUMAH WARGA	SUNGAI LIMAU
12	BENCANA SOSIAL (KEKERASAN)	LUBUK ALUNG
13	RUMAH TERTIMPA POHON	SUNGAI LIMAU
14	RUMAH TERTIMPA POHON	SUNGAI LIMAU
15	BANJIR	LUBUK ALUNG
16	BANJIR	NAN SABARIS
17	BANJIR	SUNGAI LIMAU
18	BANJIR DAN LONGSOR	SUNGAI GERINGGING
19	BANJIR	VII KOTO
20	BANJIR	ULAKAN TAPAKIS
21	BANJIR	SINTOGA
22	BANJIR	BATANG ANAI
23	BANJIR	ULAKAN TAPAKIS
24	BANJIR DAN LONGSOR	V KOTO TIMUR
25	LONGSOR	PATAMUAN

26	LONGSOR	VII KOTO
27	BANJIR DAN LONGSOR	2 X 11 KAYU TANAM
28	BANJIR DAN LONGSOR	SUNGAI GERINGGING
29	BANJIR	BATANG ANAI
30	KEBAKARAN RUMAH WARGA	LUBUK ALUNG
31	BANJIR	LUBUK ALUNG
32	BANJIR DAN LONGSOR	V KOTO KAMPUNG DALAM
33	KEBAKARAN RUMAH WARGA	2 X 11 ENAM LINGKUNG
34	Longsor	Nag. Sicincin, 2 x 11 Enam Lingkung
35	Longsor	Sungai Limau
36	Kebakaran Rumah Warga	V Koto Kampung Dalam
37	Banjir	Ulakan Tapakis
38	Longsor	Sungai Geringging
38	Kebakaran Rumah Warga	Sungai Geringging
40	Kebakaran Rumah Warga	Lubuk Alung
41	Kebakaran Rumah Warga	Batang Anai
42	Kekerasan Terhadap Kelompok Rentan	Sungai Limau
43	Kekerasan Terhadap Kelompok Rentan	Sungai Limau
44	Angin Kencang	Sungai Geringging
45	Angin Kencang	V Koto Kampung Dalam
46	Kebakaran Rumah Warga	VII Koto
47	Longsor	Sungai Limau
48	Angin Kencang	Sungai Limau
49	Kebakaran Rumah Warga	Sungai Limau
50	Angin Kencang	Patamuan
51	Angin Kencang	V Koto Kampung Dalam
52	Angin Kencang	Sungai Geringging
53	Longsor	Sintuak Toboh Gadang
54	Angin Kencang	V Koto Kampung Dalam
55	Angin Kencang	V Koto Kampung Dalam

56	Angin Kencang	V Koto Kampung Dalam
57	Angin Kencang	IV Koto Aur Malintang
58	Angin Kencang	V Koto Kampung Dalam
60	Angin Kencang	V Koto Kampung Dalam
61	Kekerasan Terhadap Kelompok Rentan	Ulakan Tapakis
62	Kekerasan Terhadap Kelompok Rentan	Ulakan Tapakis
63	Kebakaran Rumah Warga	Lubuk Alung

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial P3A

2. Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi (Asmani:2013). Selain itu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan (GPBL) merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Di Kabupaten Padang Pariaman sendiri terdapat 16 KWT aktif hingga tahun 2023 ini. Peran mereka sangat penting bagi kebersihan lingkungan di tengah-tengah masyarakat terutama masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman khususnya. Berikut ini data kelompok wadah perempuan peduli lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 8.13
Kelompok Tani/Wanita Tani Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2024

No	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1	KWT Kenanga	Korong Kandang Ampek Nagari Guguk Kec. 2x11 Kayu Tanam
2	Kel. Peduli Lingkungan	Ulakan Kec. Ulakan Tapakis
3	Kel. Kukuran Saiyo	Nagari Koto Baru Kec. Padang sago
4	Kel. Penggerak Lestari Alam	Sunur Kec. Nan Sabaris
5	KWT Mekar Sari	Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung
6	Kel. Pengurangan Resiko Bencana dan Perubahan Iklim Kampung Apar	Sungai Buluh Kec. Batang Anai
7	KWT Melati	Korong Pasa Surau Nagari Guguk Kab. Padang Pariaman
8	KWT Pandan Wangi	Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
9	Kel. Tani Bina Bersama	Korong Lubuk Laweh Jajaran Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman
10	KWT Batu Tapo	Korong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman
11	KWT Mama Ceria	Korong Ringan-Ringan Nagari Pakandangan Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman
12	Kelompok Tani Banio Sakato	Korong Matua Nagari Sikucua Timur Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman
13	KWT Cahaya Bunda	Korong Sipisang Sipinang Nagari Anduring Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
14	KWT Sakato	Korong Parik Tengah Nagari Tandikek Barat Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman
15	KWT Sinar Pagi	Korong Kampung Tengah Nagari Aia Tajun Kec. Lubuk Alung Kab.

		Padang Pariaman
16	KWT Salimah	Korong Rimbo Panjang Nagari Sungai Abang Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman
17	KT Harapan Baru	Kapalo Hilalang
18	KT Usaha Tani Sepakat	Salibutan
19	Korong Sungai Sirah	Sungai Sirah Kuranji Hulu
20	KWT Fastabiqul Khairat	Korong Tanah Taban Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur
21	KWT Kampuang Tengah Saiyo	Korong Kampuang Tengah Nagari Sunur Tengah Kec. Nan Sabaris
22	KT Rimbo Mutuih	Nagari Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung
23	KWT Sarai Sarumpun	Korong Kayu Gadang Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung
24	Keltan Cimantuang Kiri	Korong Kampuang Pondok Nagari Pasia Laweh Kec. Lubuk Alung
25	KWT Kejora	Korong Sikabu Bukik Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung
26	KWT Berkat Yakin	Korong Olo Bangau Nagari Ketaping Kec. Batang Anai

Sumber : Dinas DHKPP Kabupaten Padang Pariaman

Tabel. 8.14
Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan
Tahun 2024

No	KECAMATAN	NAMA KELOMPOK	JENIS KELAMIN
1	BATANG ANAI	Kel. Pengurangan Resiko Bencana dan Perubahan Iklim Kampung Apar Nagari Sungai Buluah	Perempuan
2	LUBUK ALUNG	Proklm Sinar Pagi Korong Kampung Tengah Nagari Aia Tajun	Perempuan
		Proklm Salimah	Perempuan

		Korong Rimbo Panjang Nagari Sungai Abang	
		Proklam Usaha Tani Sepakat Nagari Salibutan	Perempuan
		Proklam Korong Sikabu Bukik Nagari Sikabu Lubuk Alung	Perempuan
3	SINTUK TOBOH GADANG		
4	ULAKAN TAPAKIS	Proklam Binuang Sakti Nagari Ulahan	
		Proklam Peduli Lingkungan Nagari Ulahan	Laki-Laki
5	NAN SABARIS	Kelompok Penggerak Lestari Alam Nagari Sunur	Perempuan
6	2X11 ENAM LINGKUNG	Proklam Mekar Sari Nagari Sicincin	Perempuan
7	ENAM LINGKUNG	Proklam Mama Ceria Korong Ringan Ringan Nagari Pakandangan	Perempuan
8	2X11 KAYU TANAM	Proklam Kenanga Korong Kandang Ampek Nagari Guguak	Perempuan
		Proklam Melati Korong Pasa Surau Nagari Guguak	Perempuan
		Proklam Pandan Wangi Korong Pasa Galombang	Perempuan

		Nagari Kayu Tanam	
		Proklamasi Cahaya Bunda Korong Sipisang Sipinang Nagari Anduring	Perempuan
9	VII KOTO		
10	PATAMUAN	Proklamasi Sakato Korong Parik Tengah Nagari Tadikat Barat	Perempuan
		Proklamasi Tani Bina Bersama Korong Lubuk Laweh Jajaran Nagari Tandikek Utara	Laki-Laki
11	PADANG SAGO	Proklamasi Kukuran Saiyo Nagari Koto Baru	Perempuan
12	V KOTO KAMPUNG DALAM	Proklamasi Banio Sakato Korong Matua Nagari Sikucua	Laki-Laki
13	V KOTO TIMUR	Kel. Sekolah Lapangan Bencana dan Perubahan Iklim Nagari Gunung Padang Alai	
		Proklamasi Batu Tapo Korong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai	Perempuan
14	SUNGAI LIMAU		
15	BATANG GASAN		
16	SUNGAI GERINGGING	Proklamasi Korong Sungai Sirah Nagari Kuranji Hulu	Laki-Laki

17	IV KOTO AUR MALINTANG		
----	--------------------------	--	--

Sumber : Dinas DHKPP Kabupaten Padang Pariaman

Tabel. 8.15
Data Kelompok Proklm Tahun 2024

No	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1	KWT Kenanga	Korong Kandang Ampek Nagari Guguk Kec. 2x11 Kayu Tanam
2	Kel. Peduli Lingkungan	Ulakan Kec. Ulakan Tapakis
3	Kel. Kukuran Saiyo	Nagari Koto Baru Kec. Padang sago
4	Kel. Penggerak Lestari Alam	Sunur Kec. Nan Sabaris
5	KWT Mekar Sari	Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung
6	Kel. Pengurangan Resiko Bencana dan Perubahan Iklim Kampung Apar	Sungai Buluh Kec. Batang Anai
7	KWT Melati	Korong Pasa Surau Nagari Guguak Kab. Padang Pariaman
8	KWT Pandan Wangi	Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
9	Kel. Tani Bina Bersama	Korong Lubuk Laweh Jajaran Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman
10	KWT Batu Tapo	Korong Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman
11	KWT Mama Ceria	Korong Ringan-Ringan Nagari Pakandangan Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman
12	Kelompok Tani Banio	Korong Matua Nagari Sikucua

	Sakato	Timur Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman
13	KWT Cahaya Bunda	Korong Sipisang Sipinang Nagari Anduring Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
14	KWT Sakato	Korong Parik Tengah Nagari Tandikek Barat Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman
15	KWT Sinar Pagi	Korong Kampung Tengah Nagari Aia Tajun Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman
16	KWT Salimah	Korong Rimbo Panjang Nagari Sungai Abang Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman
17	KT Harapan Baru	Kapalo Hilalang
18	KT Usaha Tani Sepakat	Salibutan
19	Korong Sungai Sirah	Sungai Sirah Kuranji Hulu
20	KWT Fastabiqul Khairat	Korong Tanah Taban Nagari Limau Puruik Kec. V Koto Timur
21	KWT Kampuang Tengah Saiyo	Korong Kampuang Tengah Nagari Sunur Tengah Kec. Nan Sabaris
22	KT Rimbo Mutuih	Nagari Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung
23	KWT Sarai Sarumpun	Korong Kayu Gadang Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung
24	Keltan Cimantuang Kiri	Korong Kampuang Pondok Nagari Pasia Laweh Kec. Lubuk Alung
25	KWT Kejora	Korong Sikabu Bukik Nagari Sikabu Kec. Lubuk Alung
26	KWT Berkat Yakin	Korong Olo Bangau Nagari Ketaping Kec. Batang Anai

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi-instansi terkait di kabupaten Padang Pariaman masih belum terpenuhinya data yang tersedia mengenai kesetaraan dan keadilan Gender. Beberapa isu penting yang menjadi perhatian adalah.

1. Ketersediaan Data

Menjadikan data terpilah sebagai isu strategis untuk di programkan dan dilaksanakan pada masing-masing OPD baik kabupaten, kecamatan dan nagari. Ketersediaan data terpilah sangat penting dalam mengatasi kesenjangan dan keadilan Gender dalam bidang pembangunan secara spesifik dan Meminimalisir panduan format dan deskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender pada tiap indikator pembangunan

2. Isu Mengenai Pemberdayaan Perempuan

a. Peran Perempuan di sektor publik

Masih perlu dipersiapkan perempuan - perempuan yang berpotensi dan ikut aktif dalam peran dunia politik praktis (legislatif) dalam bentuk peningkatan kapasitas, sehingga ada keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman

b. Kekerasan terhadap perempuan dan Anak

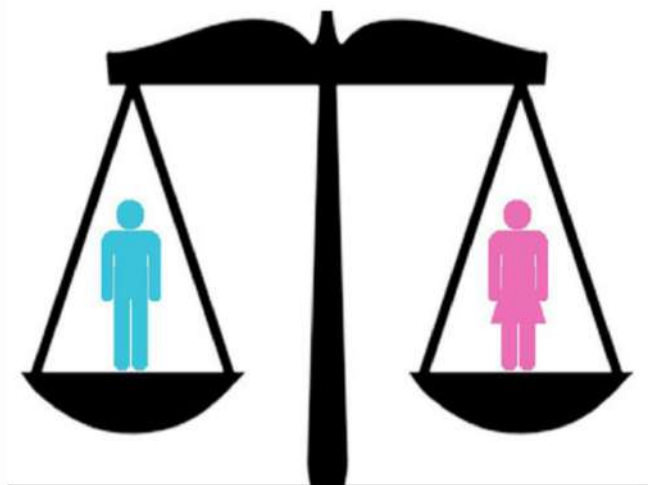
Angka kejadian kekerasan pada perempuan dan anak masih rendah karena sedikitnya yang melapor sehingga perlu menguatkan keberadaan NRPPA (Nagari Ramah Perempuan dan Peduli Anak) di setiap nagari

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilihat dari buku Profil Data Gender dan Anak Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk dapat membuka dan membagi informasi dengan mudah dan efektif.
2. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap peranan dan keterlibatan lembaga-lembaga Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG) dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Padang Pariaman.

Program penyusunan Buku Gender Profil Data Gender dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman diperlukan setiap tahun untuk mendorong ketersediaan data gender yang berkualitas di semua bidang instansi terkait. Di harapkan data dan inforamasi gender nantinya merupakan data gender yang lengkap, akurat, mutkahir dan relevan. Dengan demikian dapat dijadikan bahan rujukan dalam perumusan kebijakan berupa perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman



**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman**

